

INFORMASI DATA



PROGRAM PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN **KEPALA SEKOLAH**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH
2019**



lppks.kemdikbud.go.id



[LPPKSPS.Kemdikbud](https://www.facebook.com/LPPKSPS.Kemdikbud)



[lppksp.kemdikbud](https://www.instagram.com/lppksp.kemdikbud)



[LPPKSPS](https://twitter.com/LPPKSPS)



[LPPKS TV](https://www.youtube.com/LPPKS_TV)

INFORMASI DATA LPPKSPS

**Edisi 5
Tahun 2019**

INFORMASI DATA INI BERISI :

- 1 PESERTA PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH**
- 2 PESERTA PROGRAM PENGUATAN KEPALA SEKOLAH**
- 3 PENERIMA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP) TEREISTRASI**
- 4 KEPALA SEKOLAH YANG MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP) TEREISTRASI**
- 5 WALI WILAYAH DAN LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT (LPD)**
- 6 SEBARAN STTPP TEREISTRASI DI WILAYAH PROVINSI**
- 7 ASESOR PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH (PPCKS)**
- 8 PENGAJAR DIKLAT PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH (PPCKS) DAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH**
- 9 SUMBER DANA KEGIATAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH**
- 10 SUMBER DANA KEGIATAN DIKLAT PENGUATAN KEPALA SEKOLAH**
- 11 SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN**
- 12 LAMPIRAN DASAR HUKUM**

KONTRIBUTOR

Data Pokok Pendidik (DAPODIK)

Seksi Sistem Informasi LPPKSPS

LPD Se-Indonesia

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Diterbitkan Oleh :

LPPKSPS
@2019

Sumber data :

Sumber Data Peserta PPCKS

- Database SIM PPCKS / SIM Diklat Calon Kepala Sekolah per 31 Oktober 2019
- website <https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/cakep/>

Sumber Data Peserta Penguatan KS

- Database SIM Diklat Penguatan Kepala Sekolah per 31 Oktober 2019
- website <https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/penguatanks/>

Sumber Data STTPP Teregister

- Database NUKS LPPKS per 31 Oktober 2019
- website <http://lppks.kemdikbud.go.id/sttpp/>

Sumber Data Kepala Sekolah memiliki STTPP

- Database Cut Off Dapodik Semester 1 TA 2019
30 Juni 2019

SAMBUTAN KEPALA LPPKSPS



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
Kepala LPPKSPS

Era industri 4.0 merupakan era teknologi dan informasi termutakhir saat ini, dimana era ini ditandai dengan derasny arus informasi yang meliputi semua bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Derasnya arus informasi tersebut membawa dampak positif terhadap dunia pendidikan karena ikut mendorong berbagai pihak yang menaungi bidang pendidikan untuk mengambil manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi. Pengelolaan data informasi tentang pendidikan, terkhusus kepala sekolah dapat di management dengan rapi dan dipergunakan untuk berbagai kepentingan dengan dukungan data yang valid dan mutakhir. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut terutama dimaksudkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan memperbaiki prosedur kerja secara berkala.

Informasi tentang kepala sekolah yang disajikan dalam Informasi Data ini berguna dalam menentukan arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah. Ketersediaan informasi tentang kepala sekolah dan perkembangan teknologi haruslah mempermudah akses pada dunia pendidikan termasuk dunia kepala sekolah. Penentuan kebijakan yang tepat tentang pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah diyakini merupakan tindakan strategis karena akan membawa perubahan besar di dunia pendidikan sebab hanya kepala sekolah hebat yang dapat membina guru-guru menjadi guru hebat, yang pada gilirannya akan mampu melahirkan generasi emas pada tahun 2045 sebagaimana yang dicita-citakan oleh pemerintah.

Terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan staf atas dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan informasi data ini.

Semoga informasi data ini membawa manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia terutama bagi para penentu kebijakan yang menyangkut kepala sekolah.

Karanganyar, Desember 2019

Kepala LPPKSPS



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kontributor dan Sumber Data	iii
Sambutan Kepala LPPKSPS	iv
Daftar Isi	vi
 Bagian 1. Peserta Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS).....	 1
A. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah	2
1. Peserta Seleksi Substansi	2
B. Peserta Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala Sekolah berdasarkan Tahun Pelaksanaan ..	3
C. Peserta Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala Sekolah berdasarkan Sumber Dana ..	4
 Bagian 2. Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah	 5
A. Jumlah Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah berdasarkan Jenjang Sekolah	6
B. Jumlah Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin	7
 Bagian 3. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Teregistrasi	 9
A. STTPP Teregistrasi Terbit berdasarkan Jenis Kelamin	10
B. STTPP Teregistrasi berdasarkan Tahun Terbit	11
 Bagian 4. Kepala Sekolah dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Teregistrasi.....	 13
A. Kepala Sekolah dengan STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenjang Sekolah	14
 Bagian 5. Wali Wilayah dan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)	 15
A. Wali Wilayah dan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)	16
B. Persebaran Peta Wali Wilayah.....	19
 Bagian 6. Sebaran STTPP Teregistrasi di Wilayah Provinsi	 21
A. Peta Persebaran STTPP Teregistrasi	22
 Bagian 7. Asesor Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)	 23
A. Data Asesor berdasarkan Profesi dan Jenis kelamin	24
 Bagian 8. Pengajar Diklat Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) dan Penguatan Kepala Sekolah	 25
A. Data Pengajar Diklat berdasarkan Profesi dan Jenis Kelamin	26
 Bagian 9. Sumber Dana	 27
A. Sumber Dana APBN	28
1. Diklat Calon Kepala Sekolah	28
2. Diklat Penguatan Kepala Sekolah	29
B. Sumber Dana APBD	30
1. Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	30
2. Mekanisme Swakelola	31
a. Diklat Calon Kepala Sekolah	31

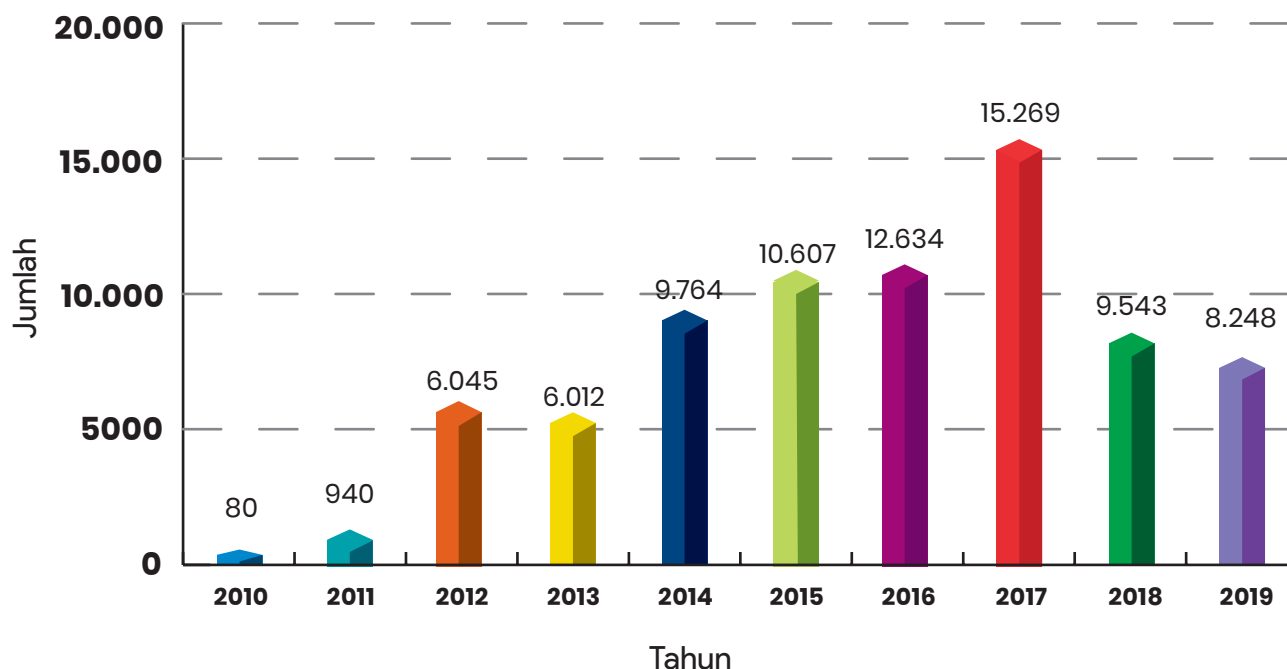
b. Diklat Penguatan Kepala Sekolah	32
Bagian 10. Sosialisasi Peraturan-Peraturan	33
A. Alur Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)	34
B. PP 19/2017 ttg Perubahan PP 74/2008 tentang Guru	35
C. Syarat Guru untuk menjadi Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2018	36
D. Persyaratan untuk menjadi Bakal Calon Pegawai Sekolah	37
E. Alur SIM Penguatan Kepala Sekolah APBN	38
F. Alur SIM Penguatan Kepala Sekolah APBD	39
G. Alur SIM Perencanaan Kebutuhan Tendik	40
H. Alur SIM Penyiapan Calon Kepala Sekolah	41
I. Alur SIM Diklat Calon Pengawas Sekolah	42
J. Seleksi Calon Kepala Sekolah	43
K. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	44
L. Proses Pengangkatan Kepala Sekolah	45
M. Penugasan Kepala Sekolah	46
N. Tugas Pokok Kepala Sekolah	47
Bagian 11. Lampiran Dasar Hukum	49
O. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017	50
P. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018	50
C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019	50
D. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19732/B.1.3/HK/2018	50
E. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap	50
F. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 0801/B.1.3/HK/2019	50
G. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5497/b.1.3/HK/2019	50
H. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19998/B.1.3/GT/2018	50
I. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18356 Tahun 2018	50
J. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.1.3/HK/2018	50

A. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah

1. Peserta Seleksi Substansi

Tabel 1. Jumlah Peserta Seleksi Substansi berdasarkan Tahun Pelaksanaan

NO.	TAHUN	JUMLAH PESERTA SELEKSI SUBSTANSI
1.	2010	80
2.	2011	940
3.	2012	6.045
4.	2013	6.012
5.	2014	9.764
6.	2015	10.607
7.	2016	12.634
8.	2017	15.269
9.	2018	9.543
10.	2019	8.248
TOTAL		79.142

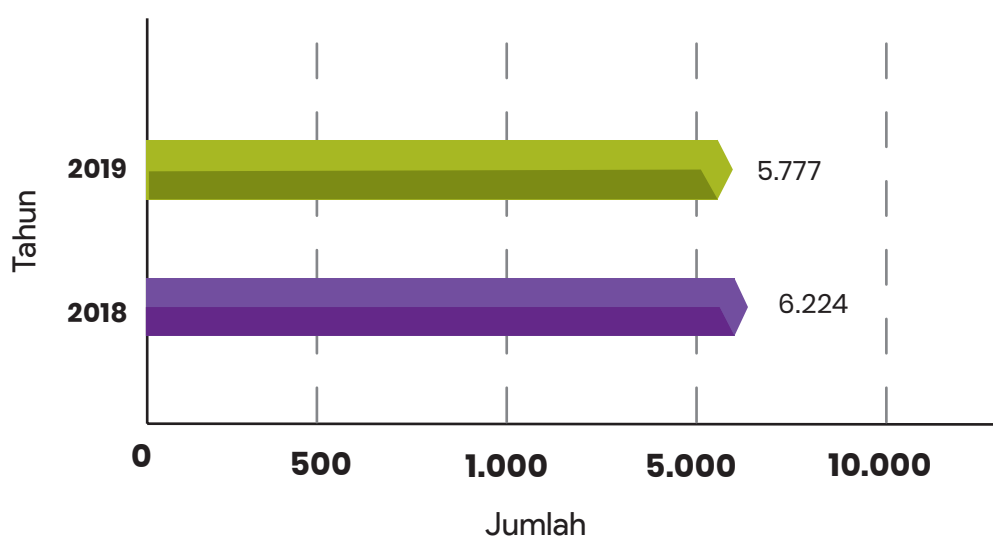


Grafik 1. Jumlah Peserta Seleksi Substansi berdasarkan Tahun Pelaksanaan

B. Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala Sekolah berdasarkan Tahun Pelaksanaan

Tabel 2. Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah

NO.	TAHUN	JUMLAH PESERTA DIKLAT CKS
1.	2018	6.224
2.	2019	5.777
TOTAL		27.758

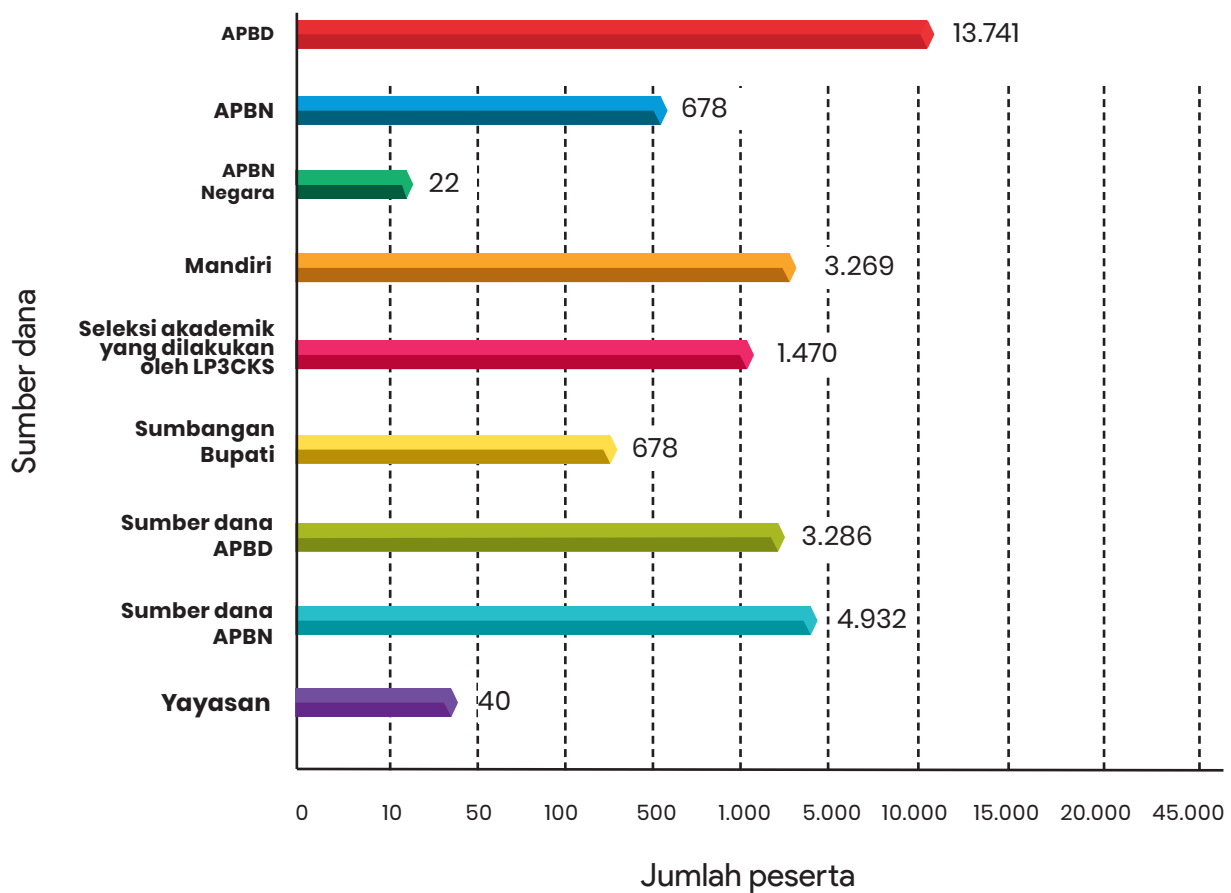


Grafik 2. Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah

C. Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala Sekolah berdasarkan Sumber Dana

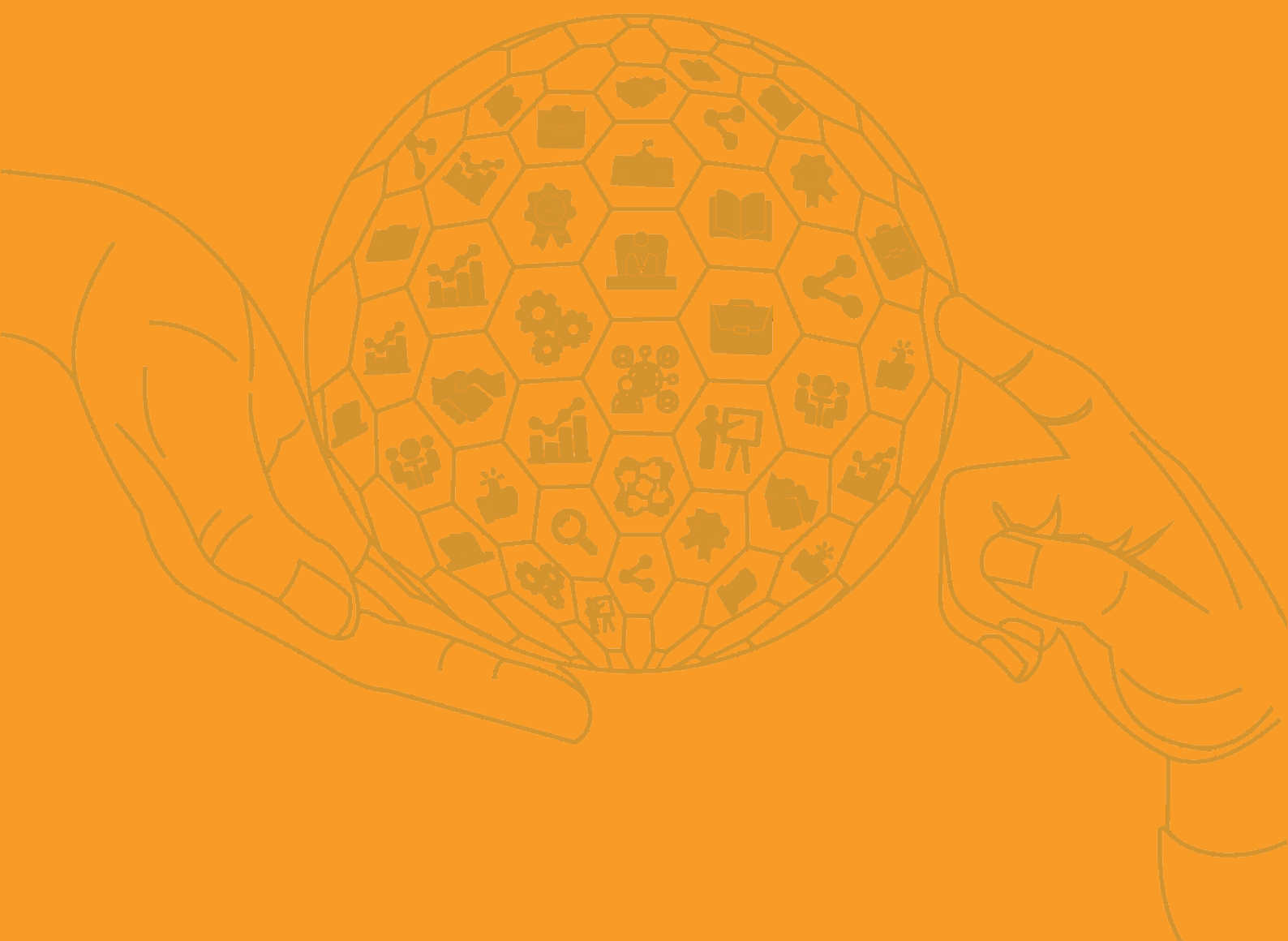
Tabel 3. Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah berdasarkan Sumber Dana

NO.	NAMA SUMBER DANA	JUMLAH PESERTA DIKLAT CKS
1.	APBD	13.741
2.	APBN	678
3.	APBN Negara	22
4.	Mandiri	3.269
5.	Seleksi akademik yang dilakukan oleh LP3CKS	1.470
6.	Sumbangan Bupati	320
7.	Sumber dana APBD	3.286
8.	Sumber dana APBN	4.932
9.	Yayasan	40
TOTAL		27.758



Grafik 3. Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah berdasarkan Sumber Dana

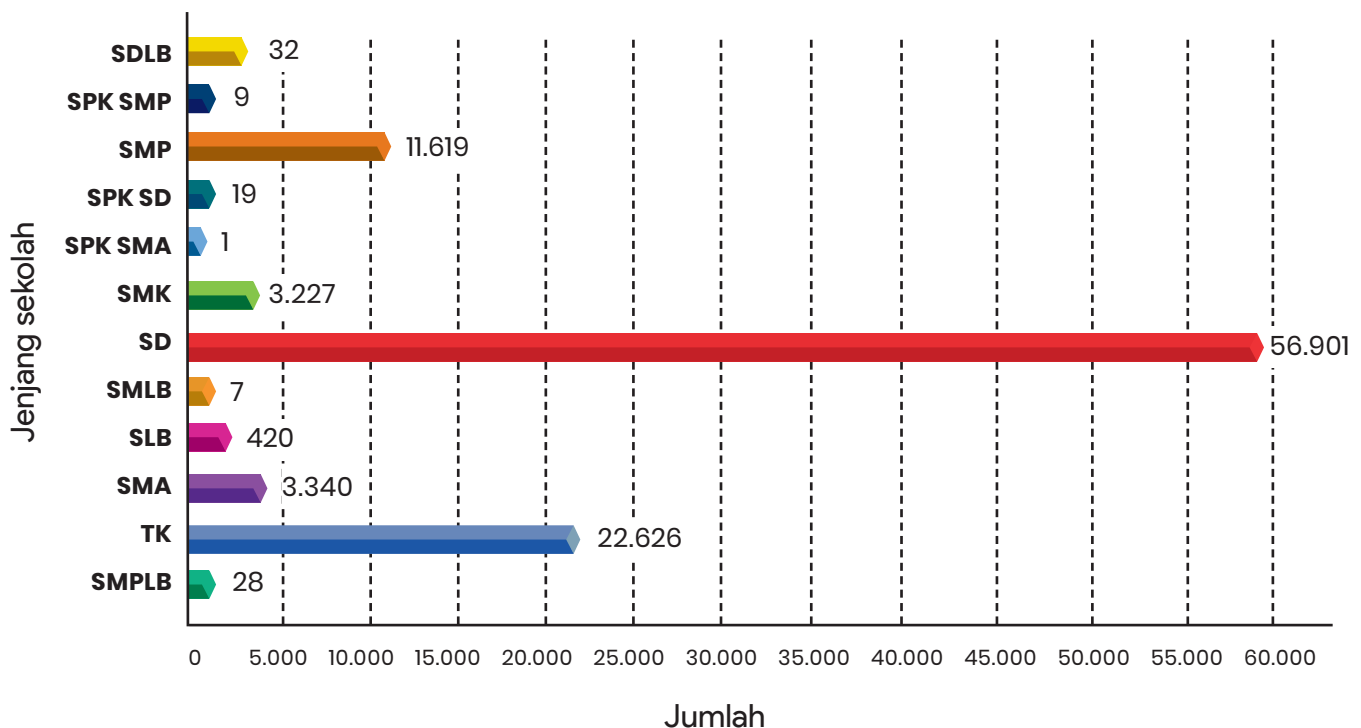
Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah



A. Jumlah Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah berdasarkan Jenjang Sekolah

Tabel 4. Jumlah Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah berdasarkan Jenjang Sekolah

NO.	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH
1.	SDLB	32
2.	SPK SMP	9
3.	SMP	11.619
4.	SPK SD	19
5.	SPK SMA	1
6.	SMK	3.227
7.	SD	56.901
8.	SMLB	7
9.	SLB	420
10.	SMA	3.340
11.	TK	22.626
12.	SMPLB	28
TOTAL		98.229

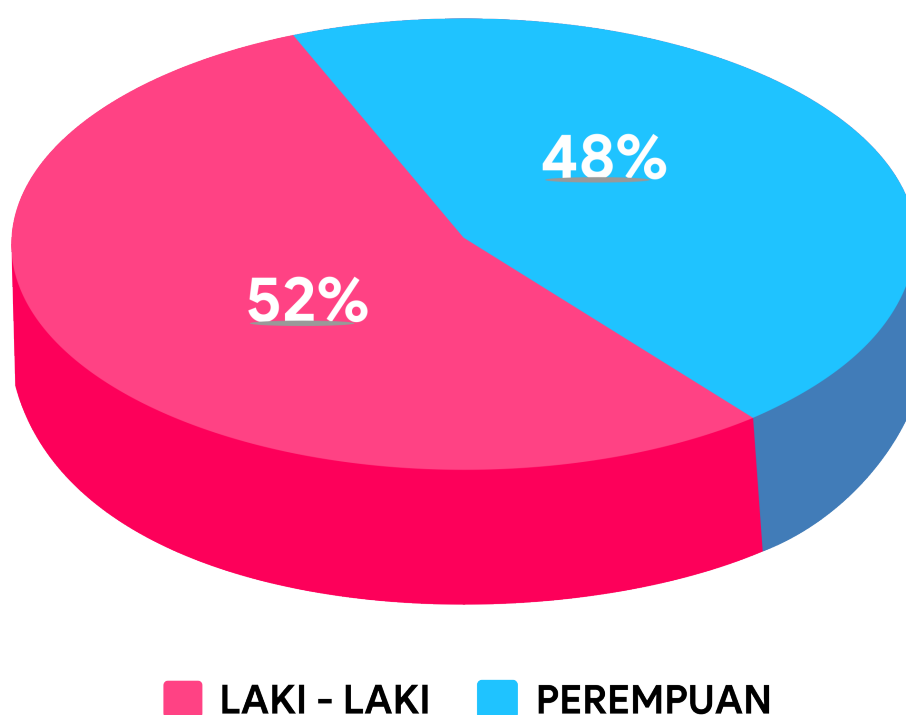


Grafik 4. Jumlah Peserta Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah berdasarkan Jenjang

B. Jumlah Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin

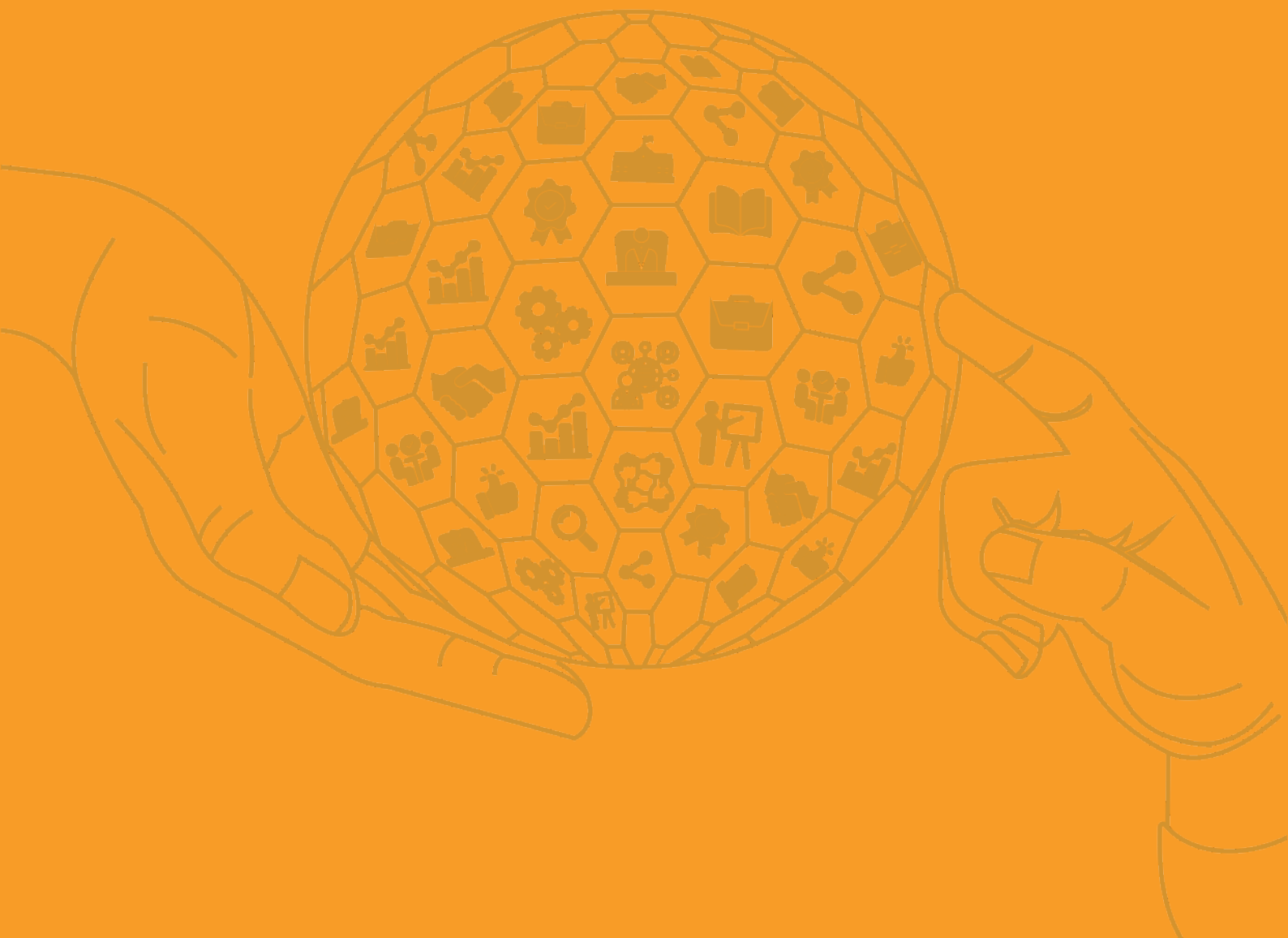
Tabel 5. Jumlah Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki - laki	51.547
2.	Perempuan	46.681
TOTAL		98.228



Grafik 5. Jumlah Peserta Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin

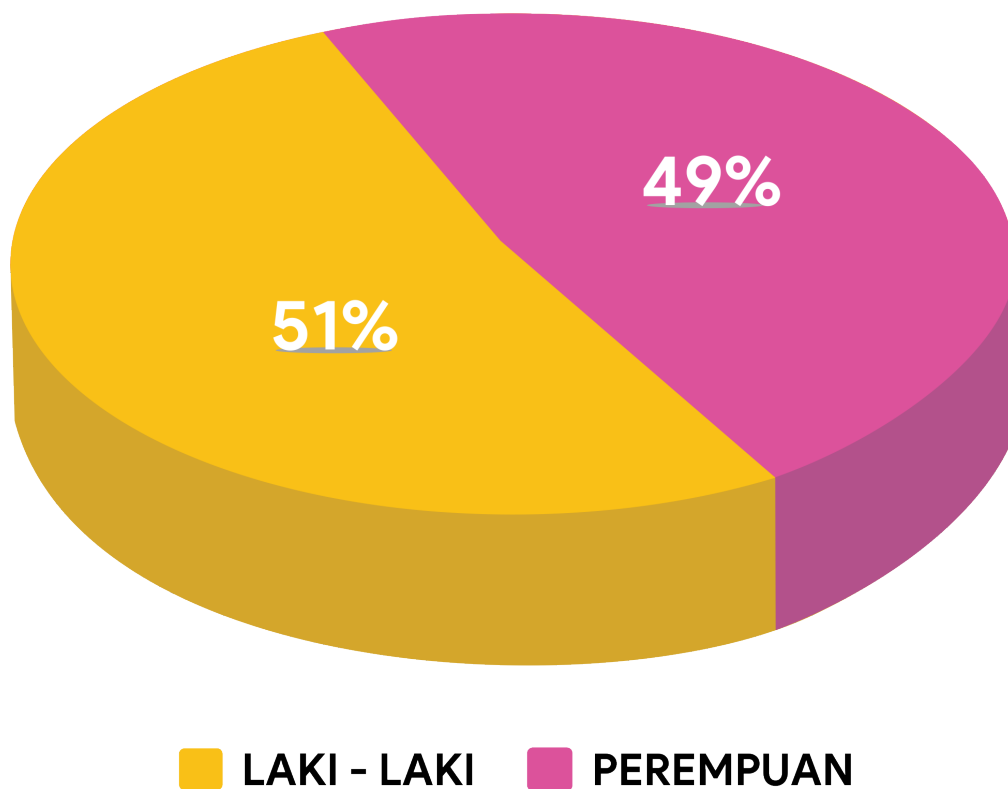
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Teregistrasi



A. STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6. STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki - laki	74.251
2.	Perempuan	73.059
TOTAL		147.310

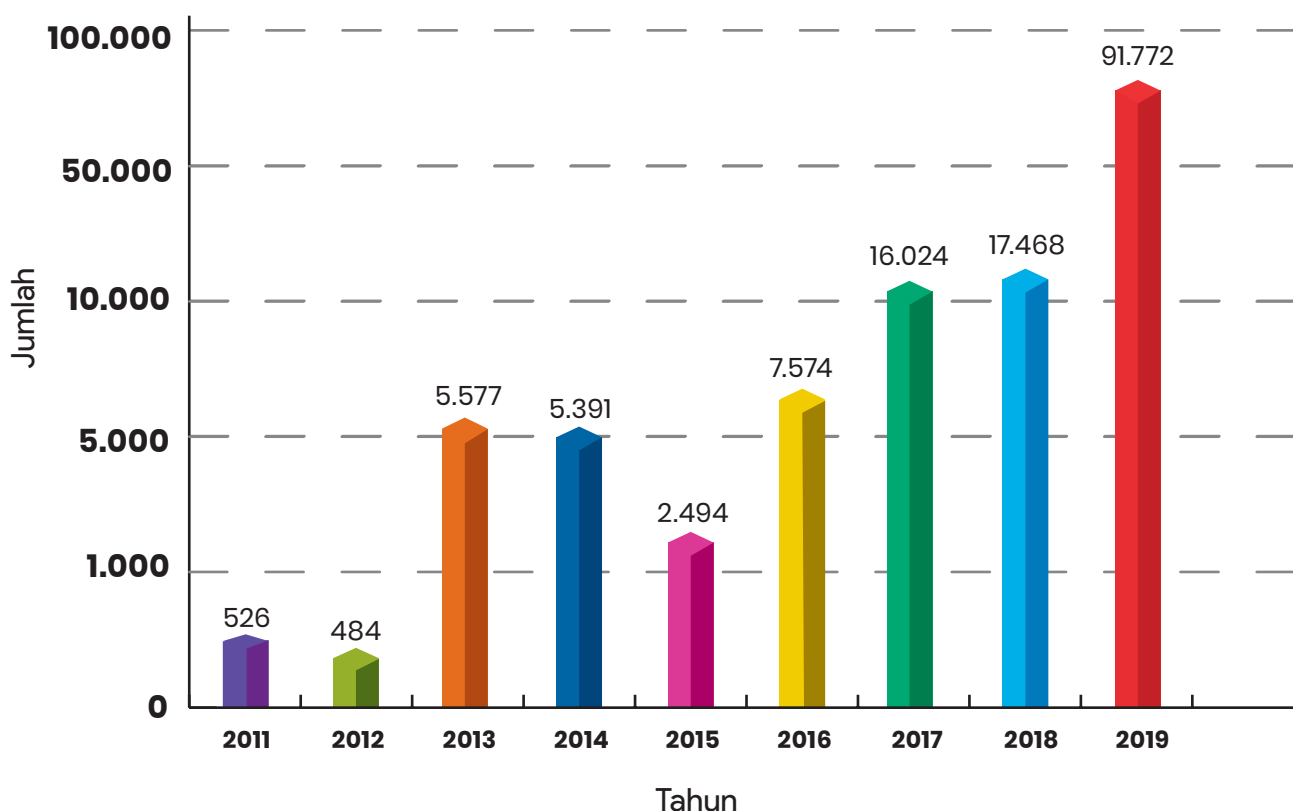


Grafik 6. STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenis Kelamin

B. STTPP Teregistrasi berdasarkan Tahun Terbit

Tabel 7. Jumlah STTPP Teregistrasi berdasarkan Tahun Terbit mulai Tahun 2011 sampai 2019

NO.	TAHUN	JUMLAH STTP TERBIT
1.	2011	526
2.	2012	484
3.	2013	5.577
4.	2014	5.391
5.	2015	2.494
6.	2016	7.574
7.	2017	16.024
8.	2018	17.468
9.	2019	91.772
TOTAL		147.310

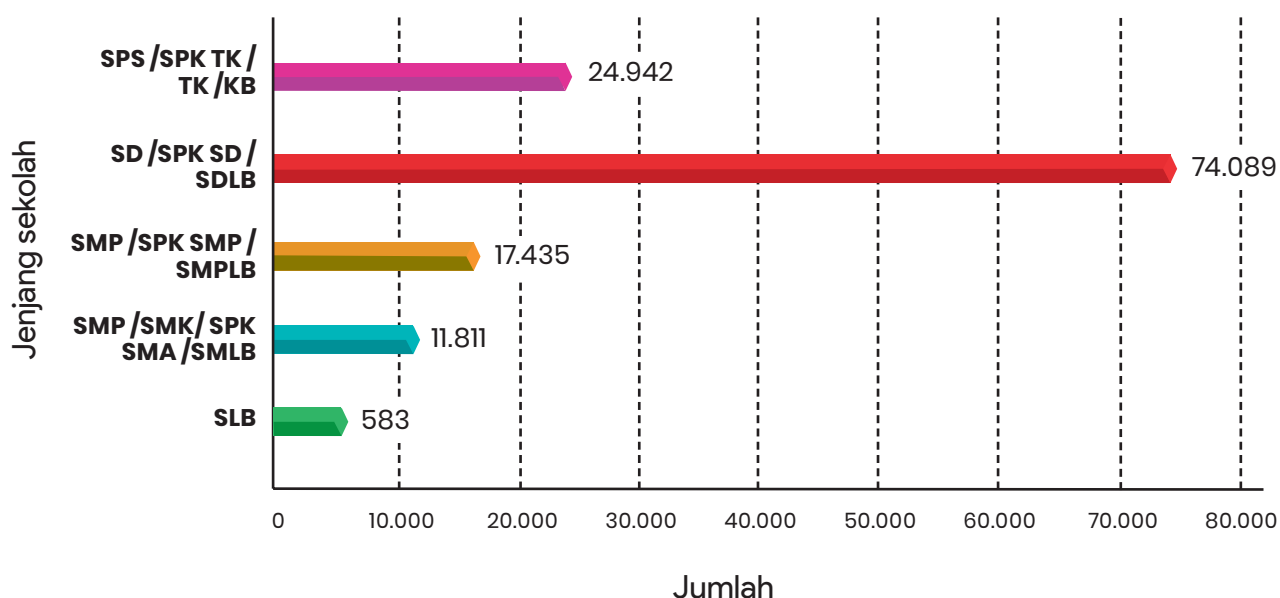


Grafik 7. STTPP Teregistrasi berdasarkan Tahun Terbit mulai Tahun 2011 sampai 2019

A. Kepala Sekolah dengan STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenjang Sekolah

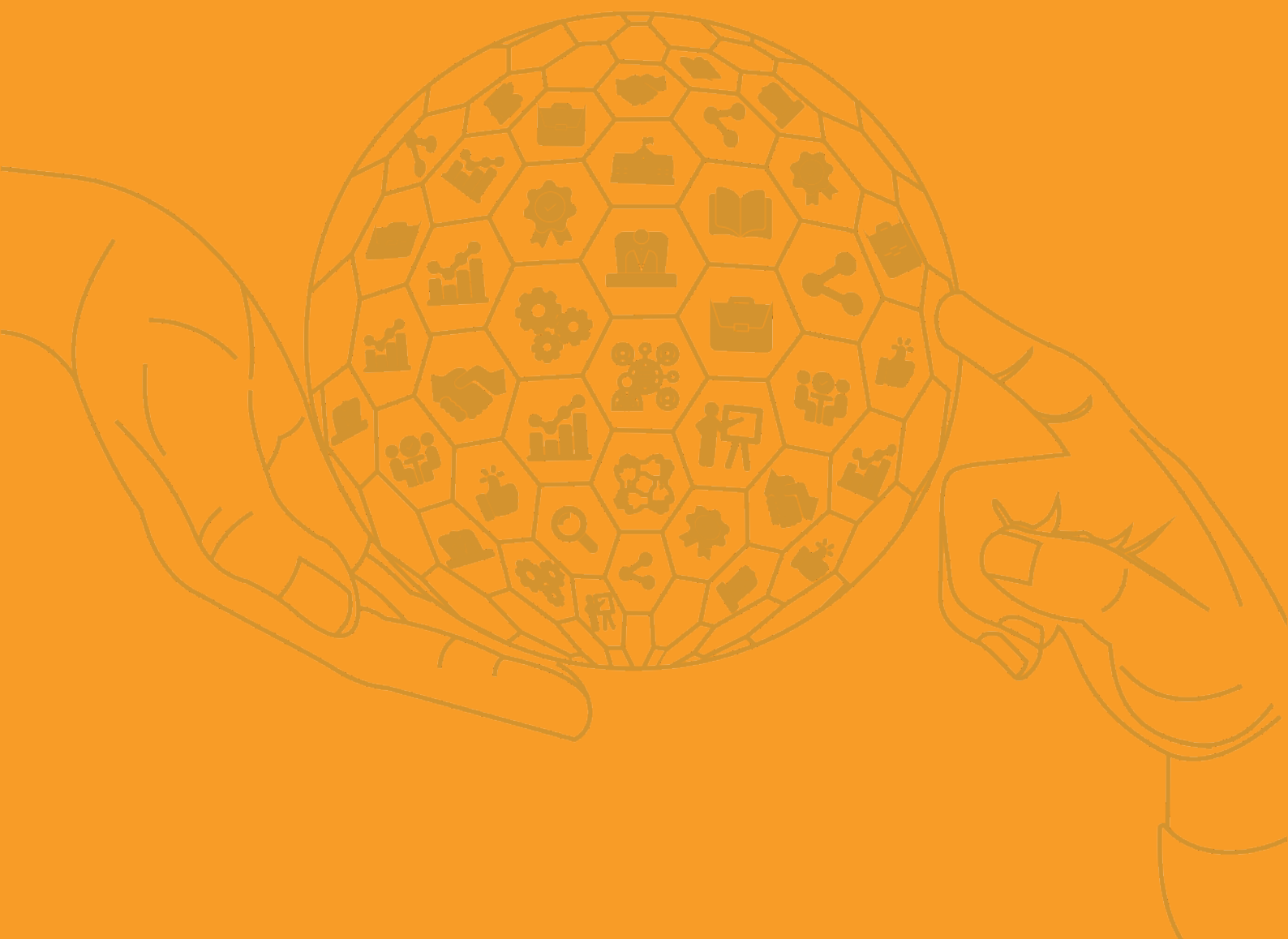
Tabel 8. Kepala Sekolah dengan STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenjang Sekolah

NO.	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH
1.	SPS/SPK TK/TK/KB	24.942
2.	SD/SPK SD/SDLB	74.089
3.	SMP/SPK SMP/SMPLB	17.435
4.	SMA/SMK/SPK SMA/SMLB	11.811
5.	SLB	583
TOTAL		128.860



Grafik 8. Kepala Sekolah dengan STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenjang Sekolah

Wali Wilayah dan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)



A. Wali Wilayah dan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)

Tabel 9. Wali wilayah dan Nama Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)

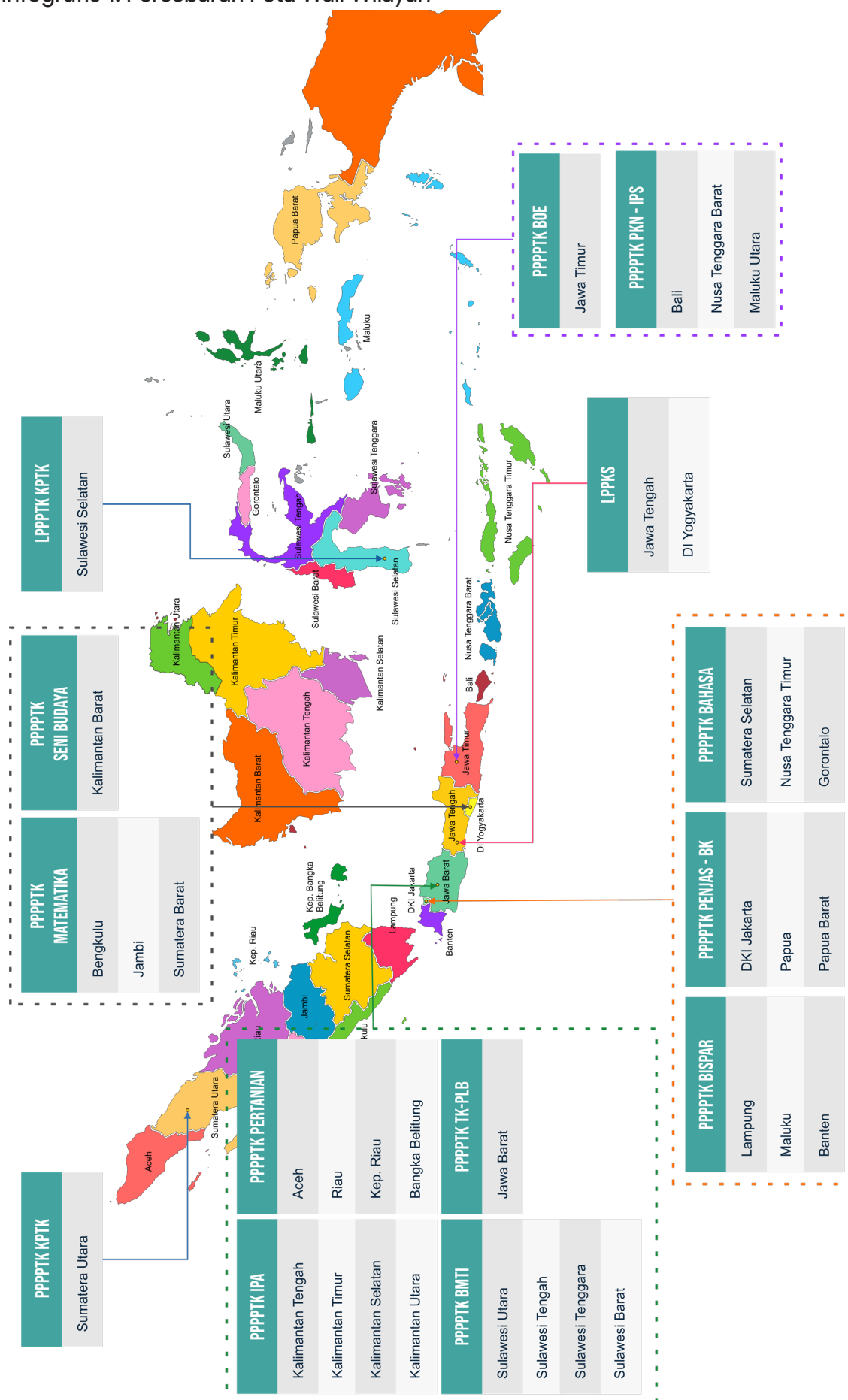
WALI WILAYAH	PROVINSI	JUMLAH	
		NO.	NAMA LPD
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS)	Prop. Jawa Tengah	1.	Universitas Veteran Bangun Nusantara
	Prop. Jawa Tengah	2.	Universitas Widya Dharma Klaten
	Prop. Jawa Tengah	3.	FKIP Univ. Sebelas Maret
	Prop. Jawa Tengah	4.	Universitas Negeri Semarang
	Prop. Jawa Tengah	5.	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
	Prop. Jawa Tengah	6.	Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
	Prop. Jawa Tengah	7.	Universitas Wahid Hasyim Semarang
	Prop. Jawa Tengah	8.	Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah
	Prop. Jawa Tengah	9.	Universitas Muhammadiyah Surakarta
	Prop. Jawa Tengah	10.	Universitas Kristen Satya Wacana
	Prop. Jawa Tengah	11.	Universitas Pancasakti Tegal
	Prop. Jawa Tengah	12.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
	Prop. Jawa Tengah	13.	Universitas PGRI Semarang
	Prop. D.I. Yogyakarta	14.	Universitas Alma Ata Yogyakarta
	Prop. D.I. Yogyakarta	15.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
	Prop. D.I. Yogyakarta	16.	Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta
	Prop. D.I. Yogyakarta	17.	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
	Prop. D.I. Yogyakarta	18.	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
	Prop. D.I. Yogyakarta	19.	Universitas Negeri Yogyakarta
PPPPTK Bahasa Jakarta	Prop. Sumatera Selatan	1.	BPSDMD Sumatera Selatan
	Prop. Sumatera Selatan	2.	Universitas PGRI Palembang
	Prop. Sumatera Selatan	3.	Universitas Sriwijaya
	Prop. Nusa Tenggara Timur	4.	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
	Prop. Nusa Tenggara Timur	5.	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
	Prop. Nusa Tenggara Timur	6.	Universitas Nusa Cendana
PPPPTK Penjas dan BK Jakarta	Prop. Gorontalo	7.	Universitas Negeri Gorontalo
	Prop. D.K.I. Jakarta	1.	Universitas Prof. DR. HAMKA Jakarta
	Prop. D.K.I. Jakarta	2.	Universitas Negeri Jakarta
	Prop. D.K.I. Jakarta	3.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
	Prop. D.K.I. Jakarta	4.	BPSDMD DKI Jakarta
	Prop. Jawa Barat	5.	Universitas Muhammadiyah Jakarta
	Prop. Papua	6.	Universitas Muhammadiyah Sorong
	Prop. Papua	7.	Universitas Cenderawasih
	Prop. Papua Barat	8.	Universitas Papua

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Jakarta	Prop. Lampung	1. STKIP PGRI Bandar Lampung
	Prop. Lampung	2. Universitas Muhammadiyah Metro Lampung
	Prop. Lampung	3. Universitas Lampung
	Prop. Maluku	4. Universitas Pattimura
	Prop. Banten	5. Universitas Pamulang
	Prop. Banten	6. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	Prop. Banten	7. BPSDMD Banten
PPPPTK PKn dan IPS Malang	Prop. Bali	1. IKIP PGRI Bali
	Prop. Nusa Tenggara Barat	2. Universitas Muhammadiyah Mataram
	Prop. Nusa Tenggara Barat	3. Universitas Nahdlatul Ulama NTB
	Prop. Nusa Tenggara Barat	4. Universitas Hamzanwadi
	Prop. Nusa Tenggara Barat	5. Universitas Mataram
	Prop. Maluku Utara	6. Universitas Khairun
PPPPTK Matematika Yogyakarta	Prop. Sumatera Barat	1. STKIP PGRI Sumatera Barat
	Prop. Sumatera Barat	2. Universitas Negeri Padang
	Prop. Bengkulu	3. Universitas Bengkulu
PPPPTK Pertanian Cianjur	Prop. Riau	1. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
PPPPTK IPA Bandung	Prop. Jawa Barat	1. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
	Prop. Kalimantan Tengah	2. Universitas Negeri Yogyakarta
	Prop. Kalimantan Selatan	3. BPSDMD Sumatera Selatan
	Prop. Kalimantan Selatan	4. Universitas Lambung Mangkurat
	Prop. Kalimantan Timur	5. Universitas Mulawarman
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta	Prop. Kalimantan Barat	1. IKIP PGRI Pontianak
PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung	Prop. Sulawesi Utara	1. Universitas Negeri Manado
	Prop. Sulawesi Tenggara	2. Universitas Haluoleo
PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang	Prop. Jawa Timur	1. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
	Prop. Jawa Timur	2. Universitas Jember
	Prop. Jawa Timur	3. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
	Prop. Jawa Timur	4. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
	Prop. Jawa Timur	5. Universitas PGRI Madiun
	Prop. Jawa Timur	6. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
	Prop. Jawa Timur	7. Universitas Muhammadiyah Surabaya
	Prop. Jawa Timur	8. Universitas Kanjuruhan Malang
	Prop. Jawa Timur	9. Universitas Muhammadiyah Jember
	Prop. Jawa Timur	10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur
	Prop. Jawa Timur	11. Universitas Muhammadiyah Gresik
	Prop. Jawa Timur	12. STKIP PGRI Pasuruan
	Prop. Jawa Timur	13. Universitas Negeri Surabaya
	Prop. Jawa Timur	14. Universitas Negeri Malang
	Prop. Jawa Timur	15. Universitas Nurul Jadid Probolinggo
	Prop. Jawa Timur	16. STKIP PGRI Sumenep

	Prop. Jawa Timur	17. STKIP PGRI Bangkalan
	Prop. Jawa Timur	18. STKIP PGRI Trenggalek
	Prop. Jawa Timur	19. Universitas Islam Malang
	Prop. Jawa Timur	20. Universitas Islam Raden Rahmat Malang
	Prop. Jawa Timur	21. STKIP PGRI Lumajang
	Prop. Jawa Timur	22. Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang
	Prop. Jawa Timur	23. STKIP PGRI Jombang
	Prop. Jawa Timur	24. Universitas Islam Lamongan
	Prop. Jawa Timur	25. Universitas Muhammadiyah Malang
	Prop. Jawa Timur	26. Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
	Prop. Jawa Timur	27. Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik Medan	Prop. Sumatera Utara	1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
	Prop. Sumatera Utara	2. Universitas Katolik Santo Thomas Medan
	Prop. Sumatera Utara	3. Universitas Negeri Medan
	Prop. Sumatera Utara	4. BPSDMD Sumatera Utara
PPPPTK IPA Bandung	Prop. Jawa Barat	1. Marwita Magiswara Yayasan Satya Winaya
	Prop. Jawa Barat	2. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
	Prop. Jawa Barat	3. Universitas Islam Nusantara Bandung
	Prop. Jawa Barat	4. Universitas Pakuan
	Prop. Jawa Barat	5. Universitas Pasundan
	Prop. Jawa Barat	6. Universitas Ibnu Khaldun
	Prop. Jawa Barat	7. Universitas Swadaya Gunung Jati
	Prop. Bali	8. Universitas Pendidikan Ganesha
LPPPTK KPTK	Prop. Sulawesi Tengah	1. Universitas Islam Makassar
	Prop. Sulawesi Tengah	2. Universitas Muhammadiyah Parepare
	Prop. Sulawesi Selatan	3. Universitas Muhammadiyah Makassar
	Prop. Sulawesi Selatan	4. Universitas Negeri Makassar
	Prop. Sulawesi Barat	5. Universitas Al Asyariah Mandar

B. Persebaran Peta Wali Wilayah

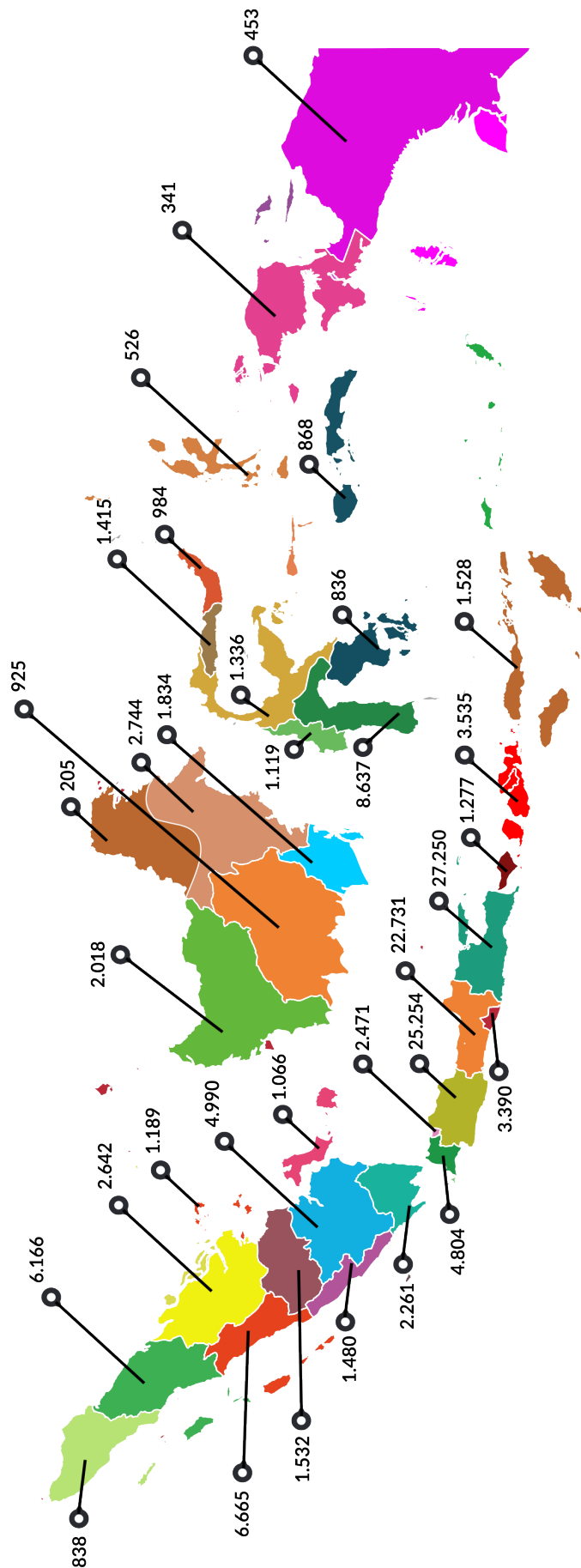
Infografis 1. Persebaran Peta Wali Wilayah



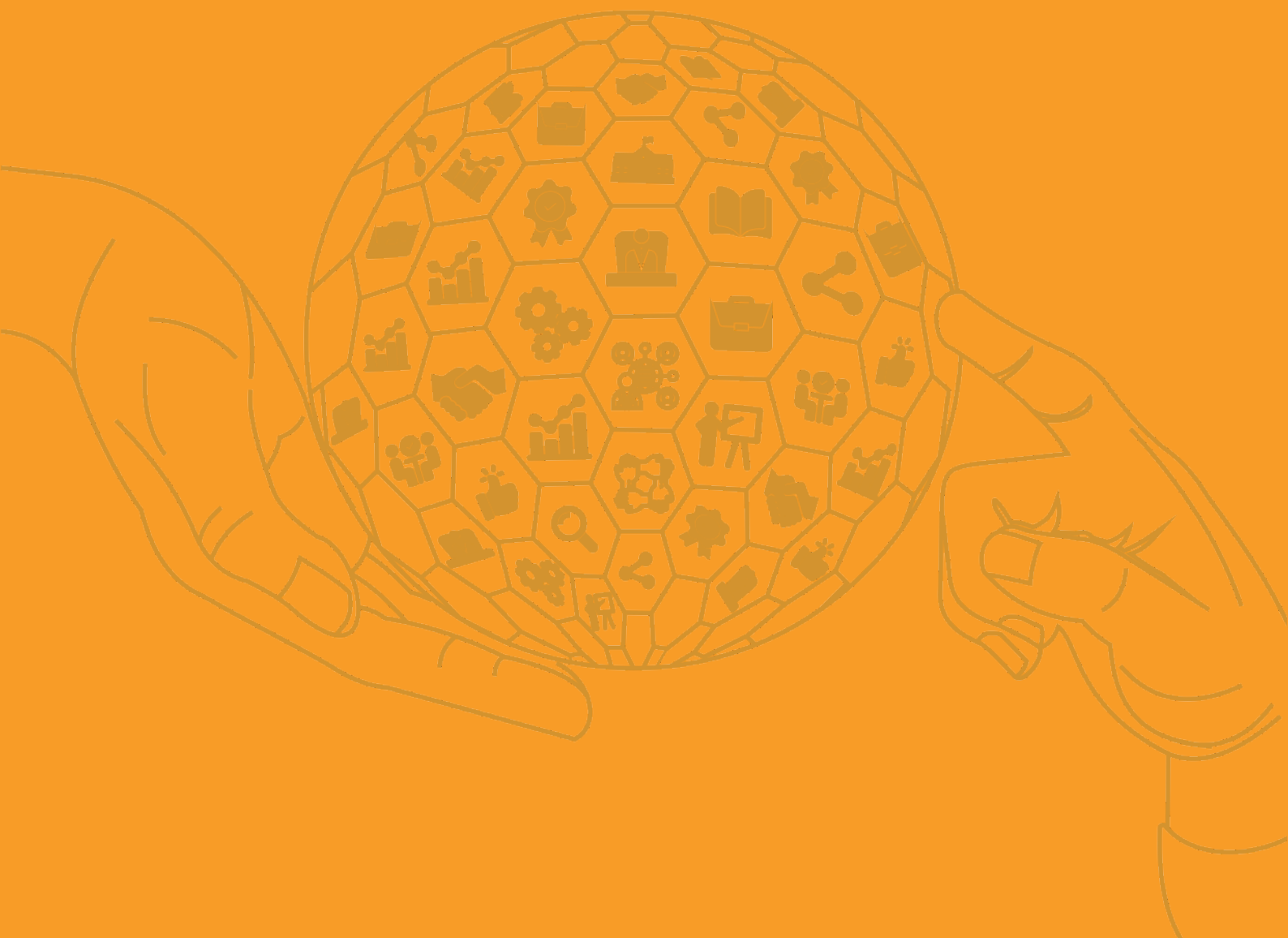
Sebaran STTPP Teregistrasi di Wilayah Provinsi

A. Peta Persebaran STTPP Teregistrasi

Infografis 2. Peta Persebaran STTPP Teregistrasi



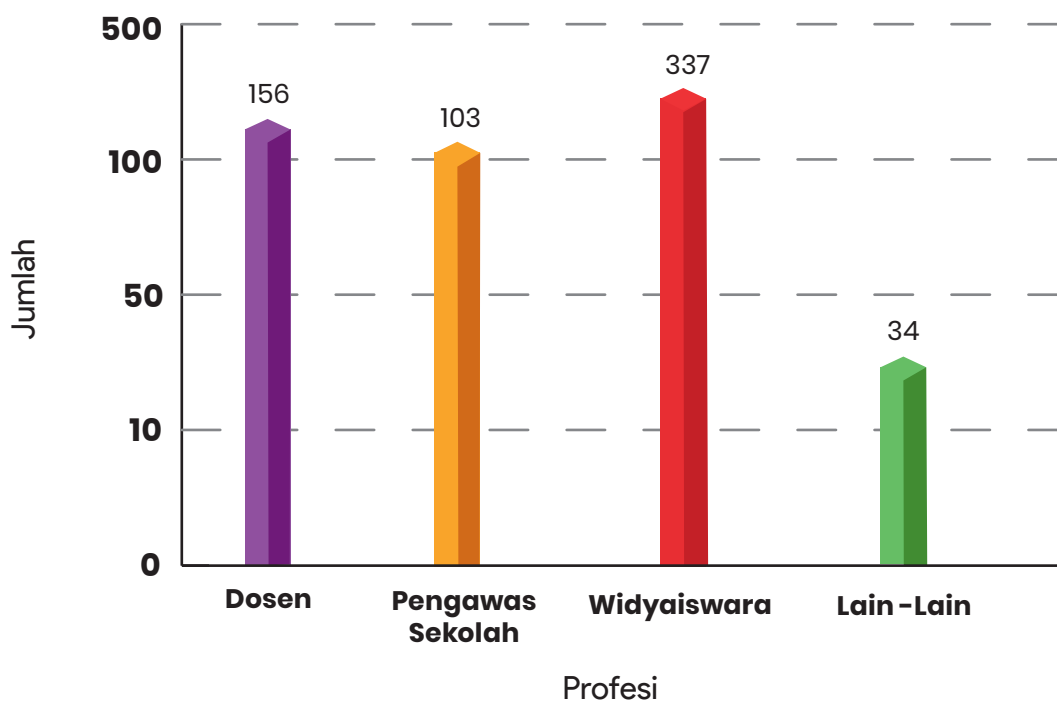
Asesor Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)



A. Data Asesor berdasarkan Profesi dan Jenis Kelamin

Tabel 10. Data Asesor berdasarkan Profesi dan Jenis Kelamin

NO.	PROFESI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Dosen	102	54	156
2.	Pengawas Sekolah	61	42	103
3.	Widyaiswara	208	129	337
4.	Lain-lain	27	16	43
TOTAL		398	241	639

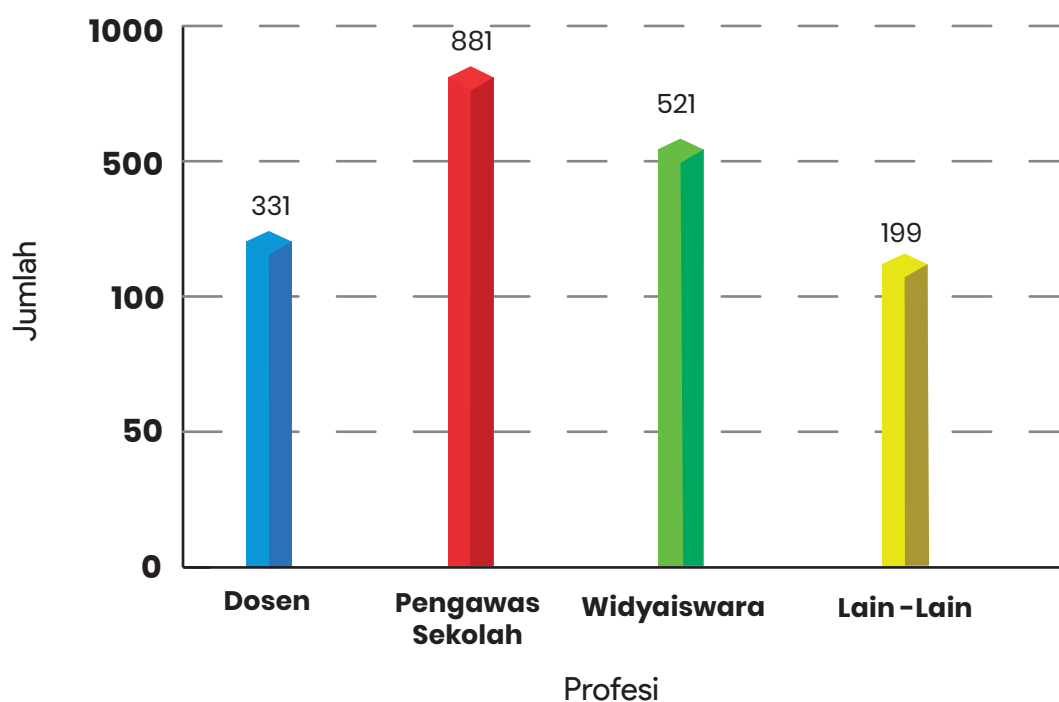


Grafik 10. Data Asesor berdasarkan Profesi dan Jenis Kelamin

A. Data Pengajar Diklat berdasarkan Profesi dan Jenis Kelamin

Tabel 11. Data Pengajar Diklat berdasarkan Profesi dan Jenis Kelamin

NO.	PROFESI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Dosen	210	121	331
2.	Pengawas Sekolah	633	248	881
3.	Widyaiswara	327	194	521
4.	Lain-lain	142	57	199
TOTAL		1.312	620	1.932



Grafik 11. Data Pengajar Diklat berdasarkan Profesi dan Jenis Kelamin

A. Sumber Dana APBN

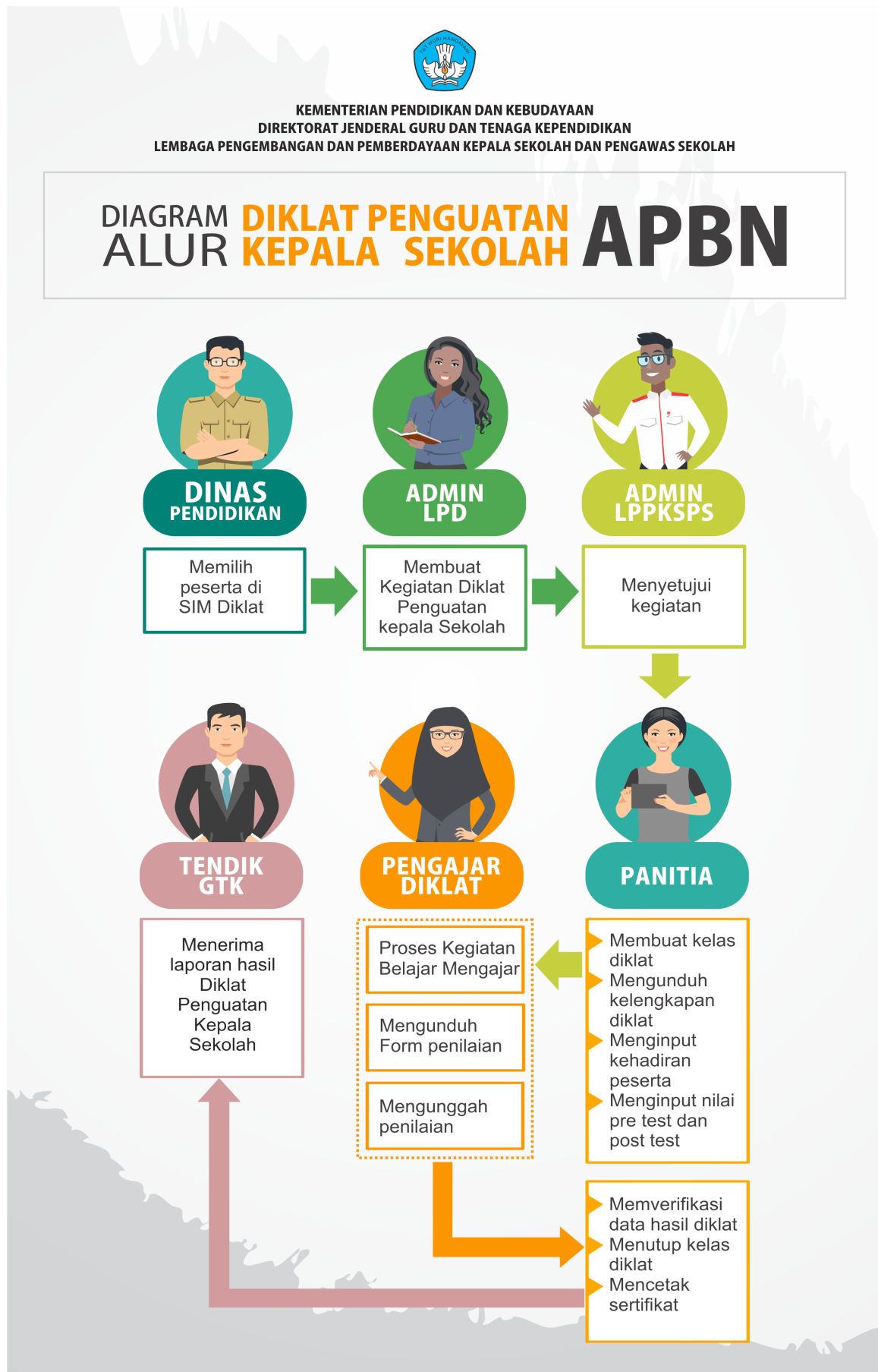
1. Diklat Calon Kepala Sekolah

Infografis 3. Diklat Calon Kepala Sekolah



2. Diklat Penguatan Kepala Sekolah

Infografis 4. Diklat Penguatan Kepala Sekolah

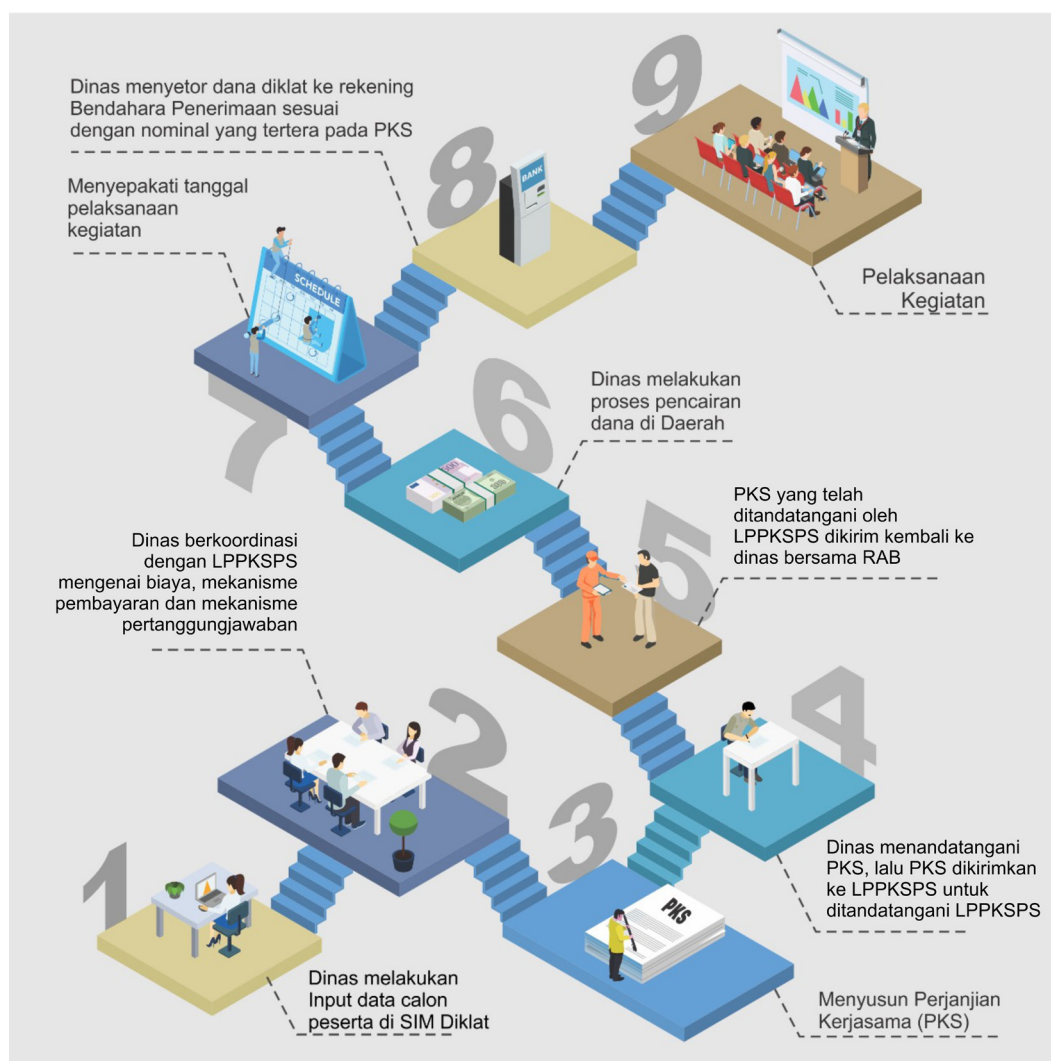


B. Sumber Dana APBD

1. Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bentuk kontrak kerjasama dengan pihak lain dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Maka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau agar seluruh bentuk kontrak kerjasama yang berpotensi mendatangkan penerimaan negara, dilaksanakan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 509/KMK.02/2018 tentang percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

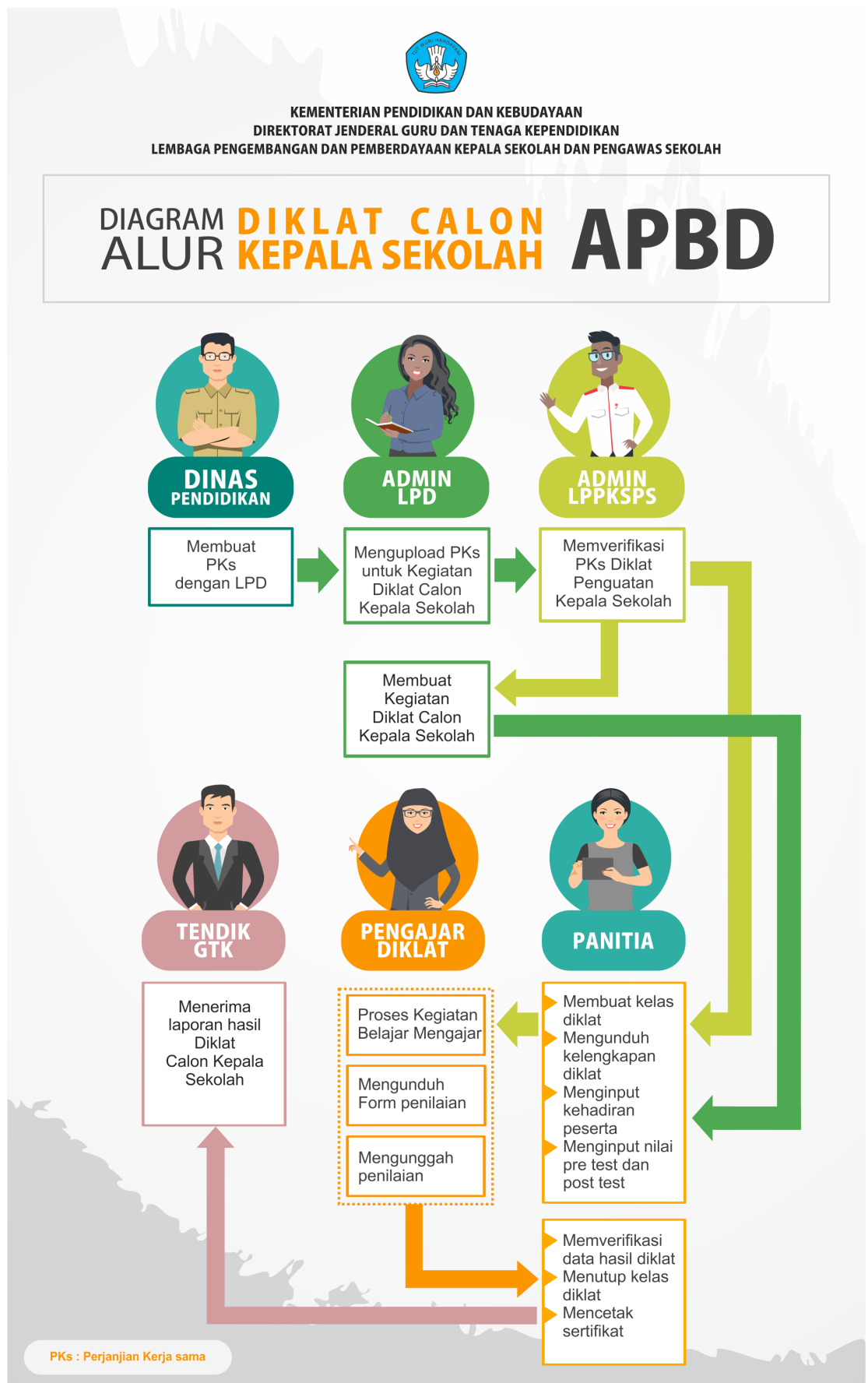
Infografis 5. Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



2. Mekanisme Swakelola

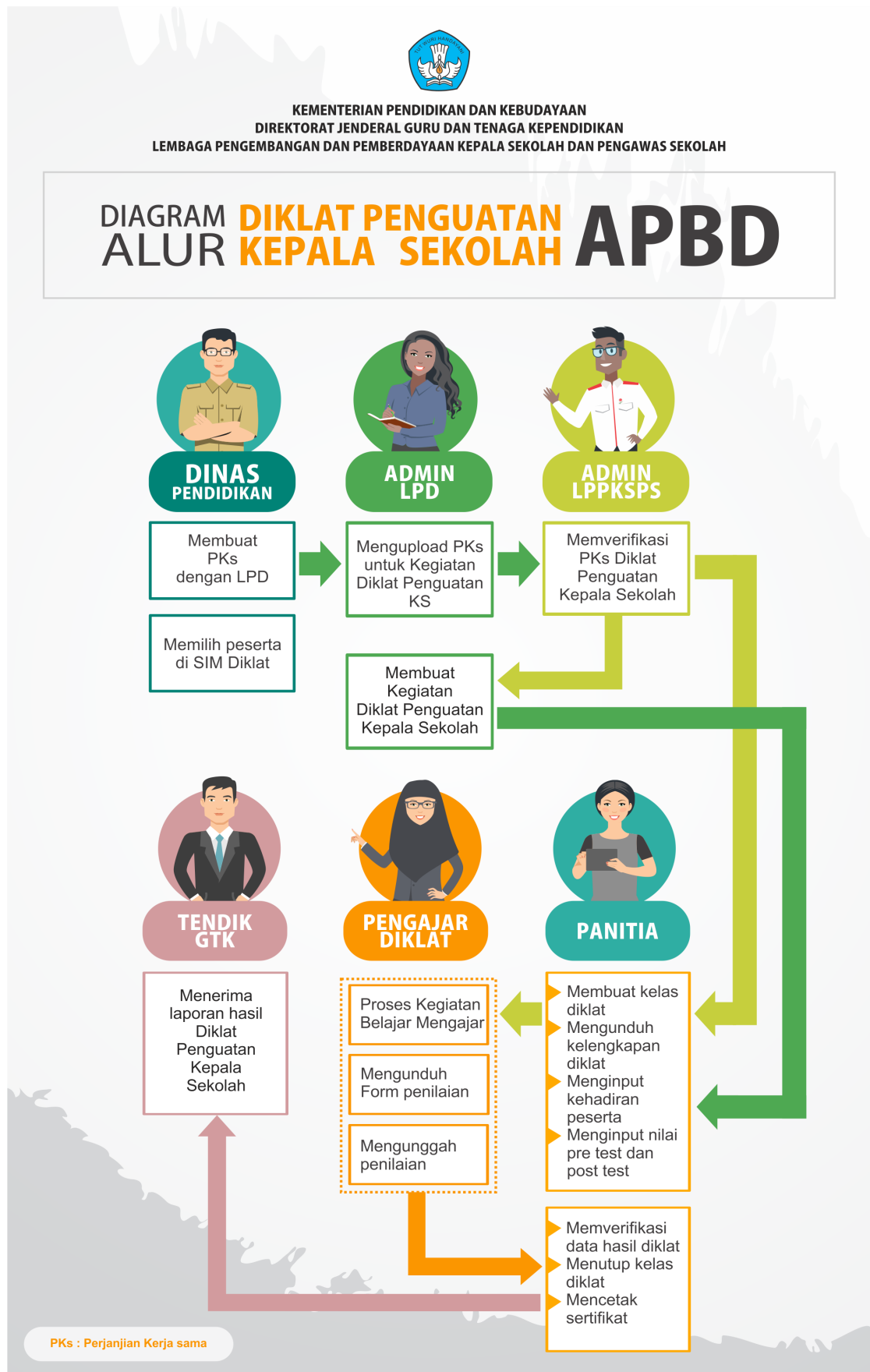
a. Diklat Calon Kepala Sekolah

Infografis 6. Diklat Calon Kepala Sekolah



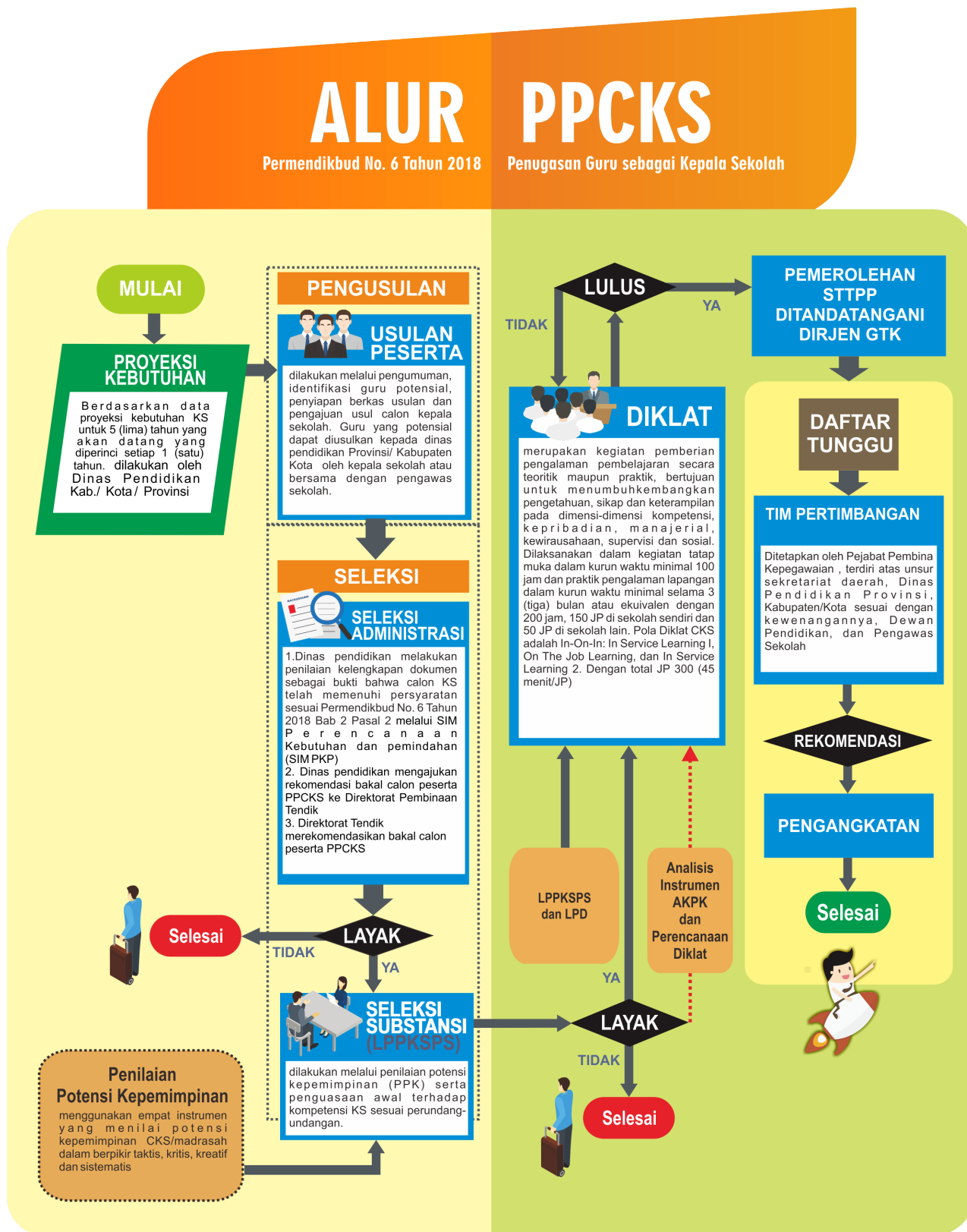
b. Diklat Penguatan Kepala Sekolah

Infografis 7. Diklat Penguatan Kepala Sekolah



A. Alur Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)

Infografis 8. Alur PPCKS



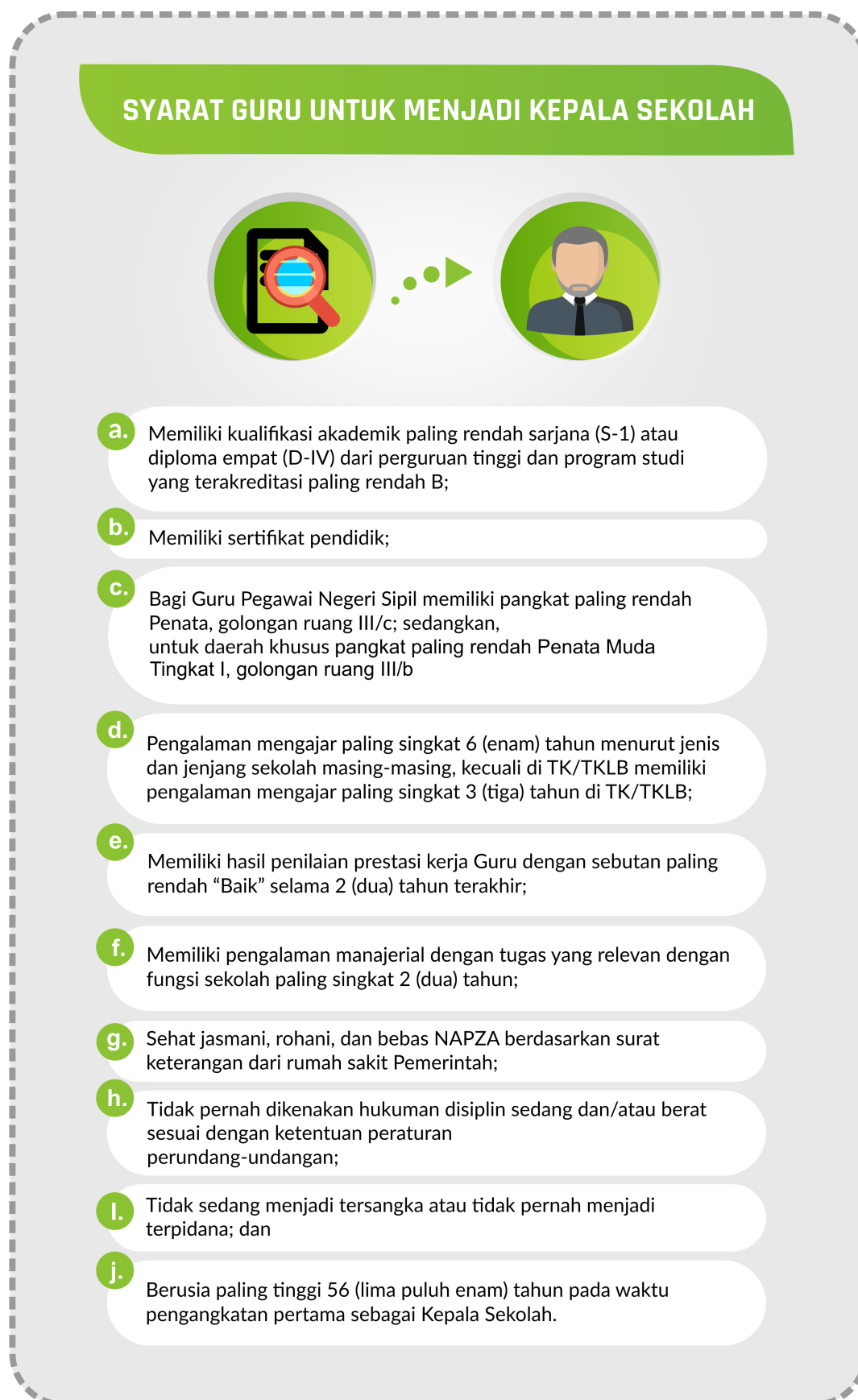
B. PP 19/2017 ttg Perubahan PP 74/2008 tentang Guru

Infografis 9. PP 19/2017 tentang Perubahan PP 74/2018 tentang Guru



C. Syarat Guru untuk menjadi Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2018

Infografis 10. Syarat Guru untuk menjadi Kepala Sekolah (Permendikbud No 6 Tahun 2018)



D. Persyaratan untuk menjadi bakal Calon Pengawas Sekolah

Infografis 11. Persyaratan untuk menjadi bakal Calon Penawas Sekolah berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas Sekolah



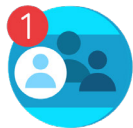
PERDIRJEN GTK 24907/B.B13/HK/2018

- 1** Masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing.
- 2** Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV;
- 3** Memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- 4** Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 5** Setiap aspek penilaian perilaku kerja pada Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil paling rendah bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap aspek penilaian perilaku kerja

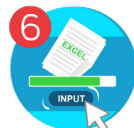
E. Alur SIM Penguatan Kepala Sekolah APBN

Infografis 12. Alur SIM Penguatan Kepala Sekolah APBN

PENGUATAN KEPALA SEKOLAH APBN



Dinas kab.kota/propinsi
memilih calon peserta



Pengajar diklat memasukkan
penilaian sikap dan keterampilan
peserta



Admin LPD membuat kegiatan
dengan memilih Dinas kab.kota
/ propinsi, pengajar, dan panitia



Panitia/operator memasukkan
rekap jawaban pre/post test
setiap peserta



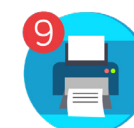
LPPKSPS melakukan
persetujuan kegiatan



Peserta melakukan pengisian
instrumen evaluasi melalui sistem



Panitia/operator LPD memilih
peserta berdasarkan ajuan dari
Dinas kab.kota/propinsi



Panitia/operator LPD
mencetak sertifikat



Panitia/operator LPD membuat
kelas maksimal 40 peserta
dan 2 pengajar diklat

F. Alur SIM Penguatan Kepala Sekolah APBD

Infografis 13. Alur SIM Penguatan Kepala Sekolah APBD

PENGUATAN KEPALA SEKOLAH APBD



1 Dinas kab.kota/propinsi memilih calon peserta



7 Panitia/operator LPD membuat kelas maksimal 40 peserta dan 2 pengajar diklat



2 Admin LPD upload perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani bersama dinas



8 Pengajar diklat memasukkan penilaian sikap dan keterampilan peserta



3 LPPKSPS melakukan verifikasi perjanjian kerjasama antara LPD dengan dinas



9 Panitia/operator memasukkan rekap jawaban pre/post test setiap peserta



4 Admin LPD membuat kegiatan dengan memilih Dinas kab.kota / propinsi, pengajar, dan panitia



10 Peserta melakukan pengisian instrumen evaluasi melalui sistem



5 LPPKSPS melakukan persetujuan kegiatan



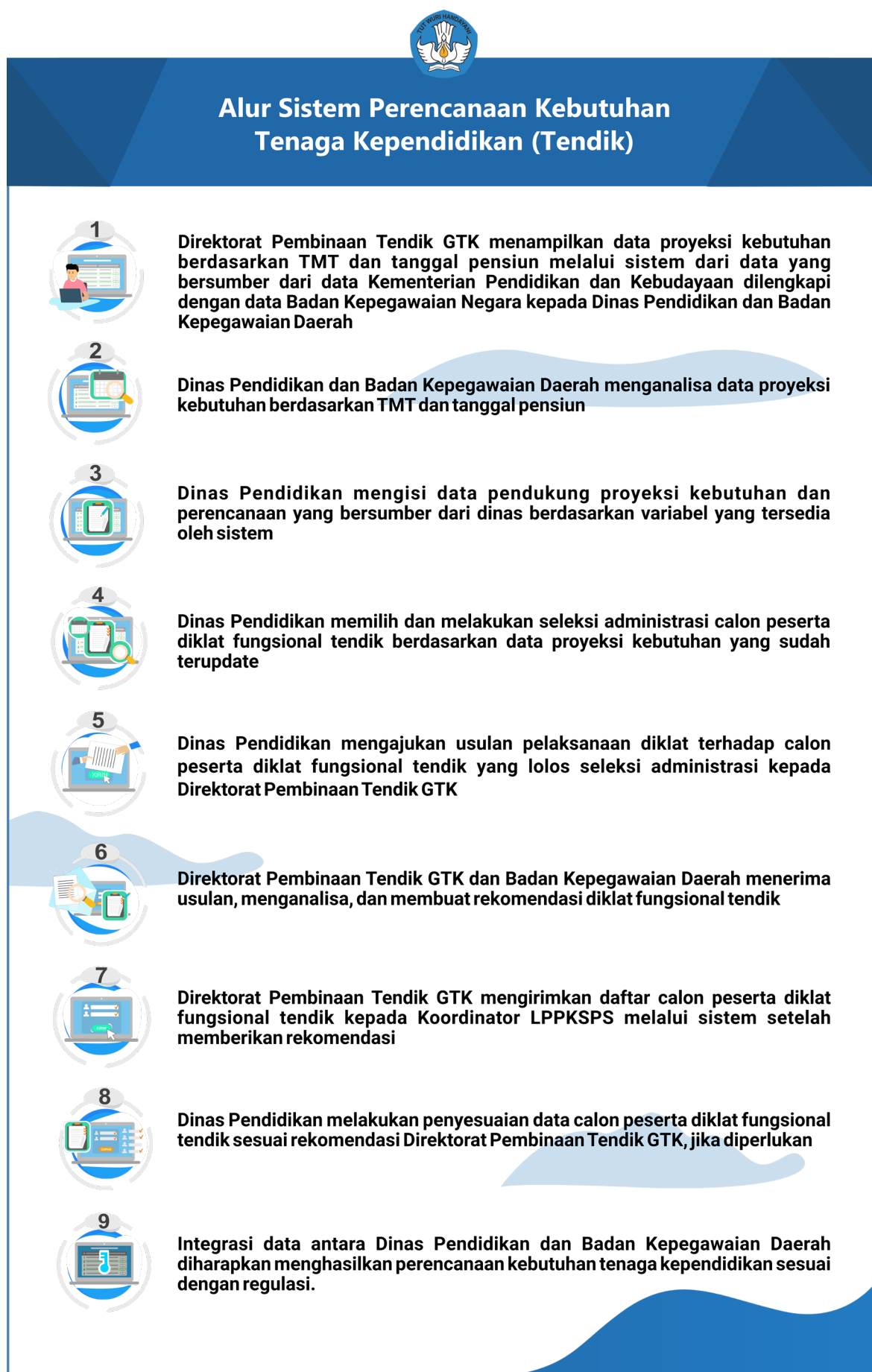
11 Panitia/operator LPD mencetak sertifikat



6 Panitia/operator LPD memilih peserta berdasarkan ajuan dari Dinas kab.kota/propinsi

G. Alur SIM Perencanaan Kebutuhan Tendik

Infografis 14. Alur SIM Perencanaan Kebutuhan Tendik

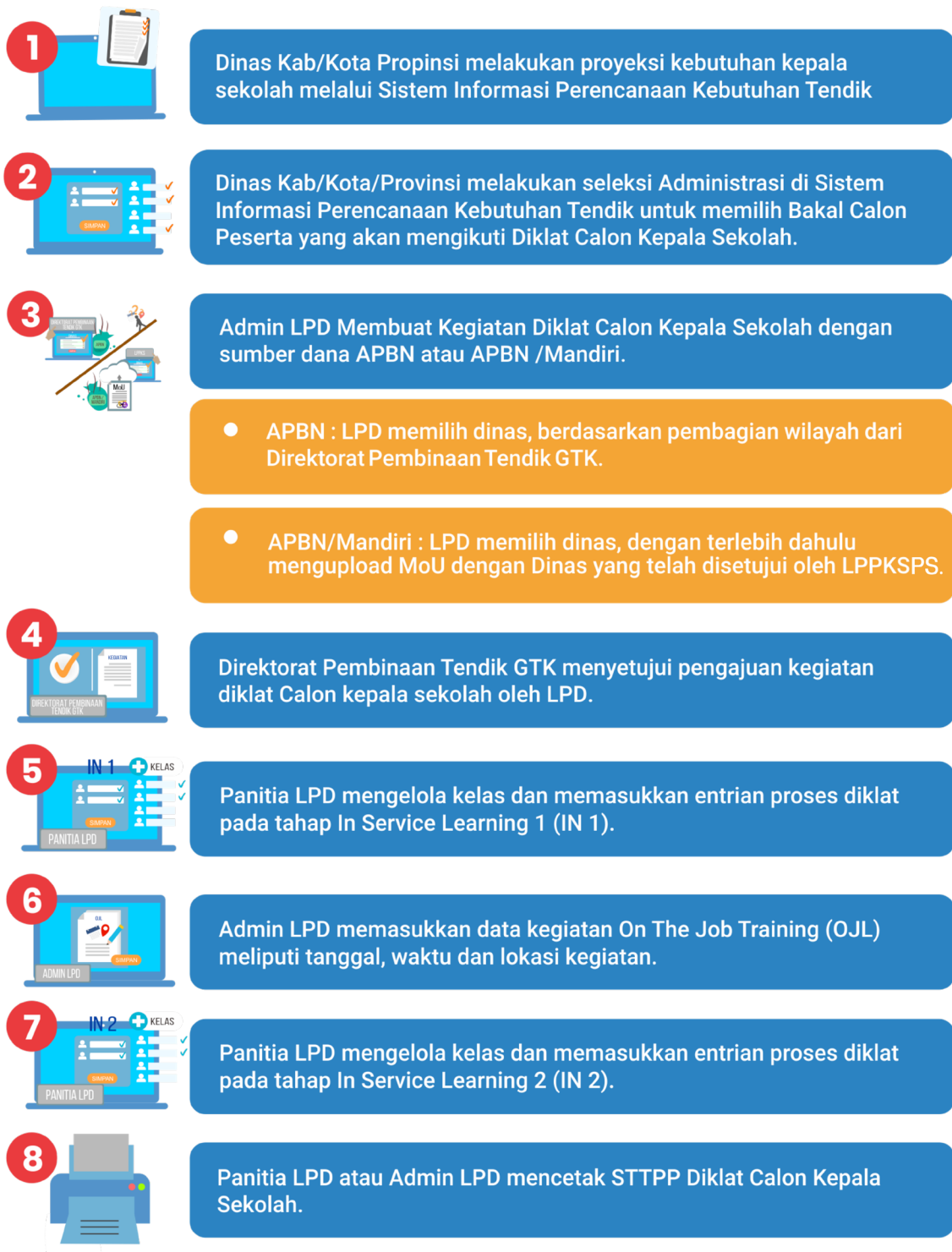


H. Alur SIM Diklat Calon Kepala Sekolah

Infografis 15. Alur SIM Diklat Calon Kepala Sekolah



ALUR PROSES SISTEM INFORMASI Diklat Calon Kepala Sekolah



 <https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/cakep>

I. Alur SIM Diklat Calon Pengawas Sekolah

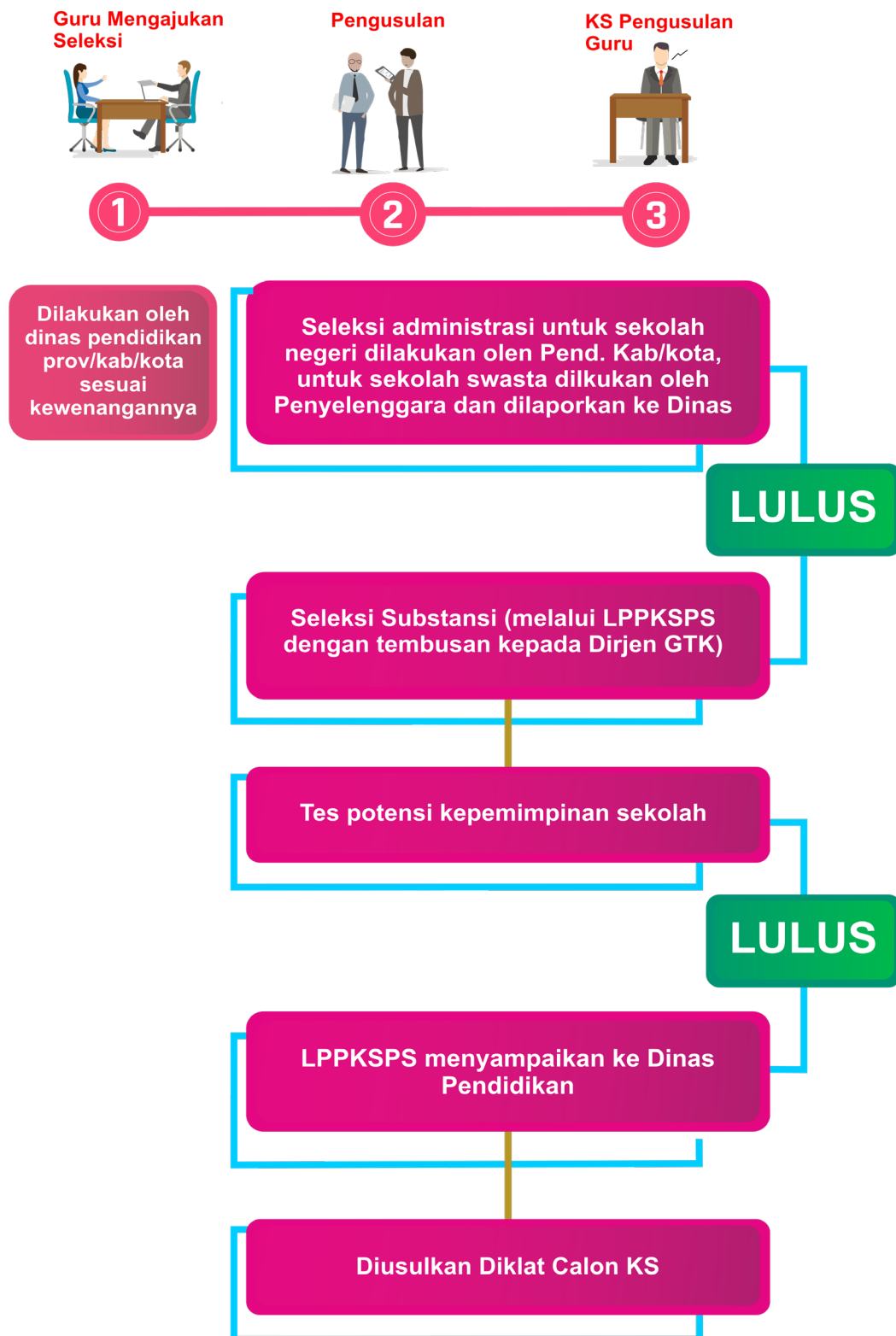
Infografis 16. Alur SIM Diklat Calon Pengawas Sekolah



J. Seleksi Calon Kepala Sekolah

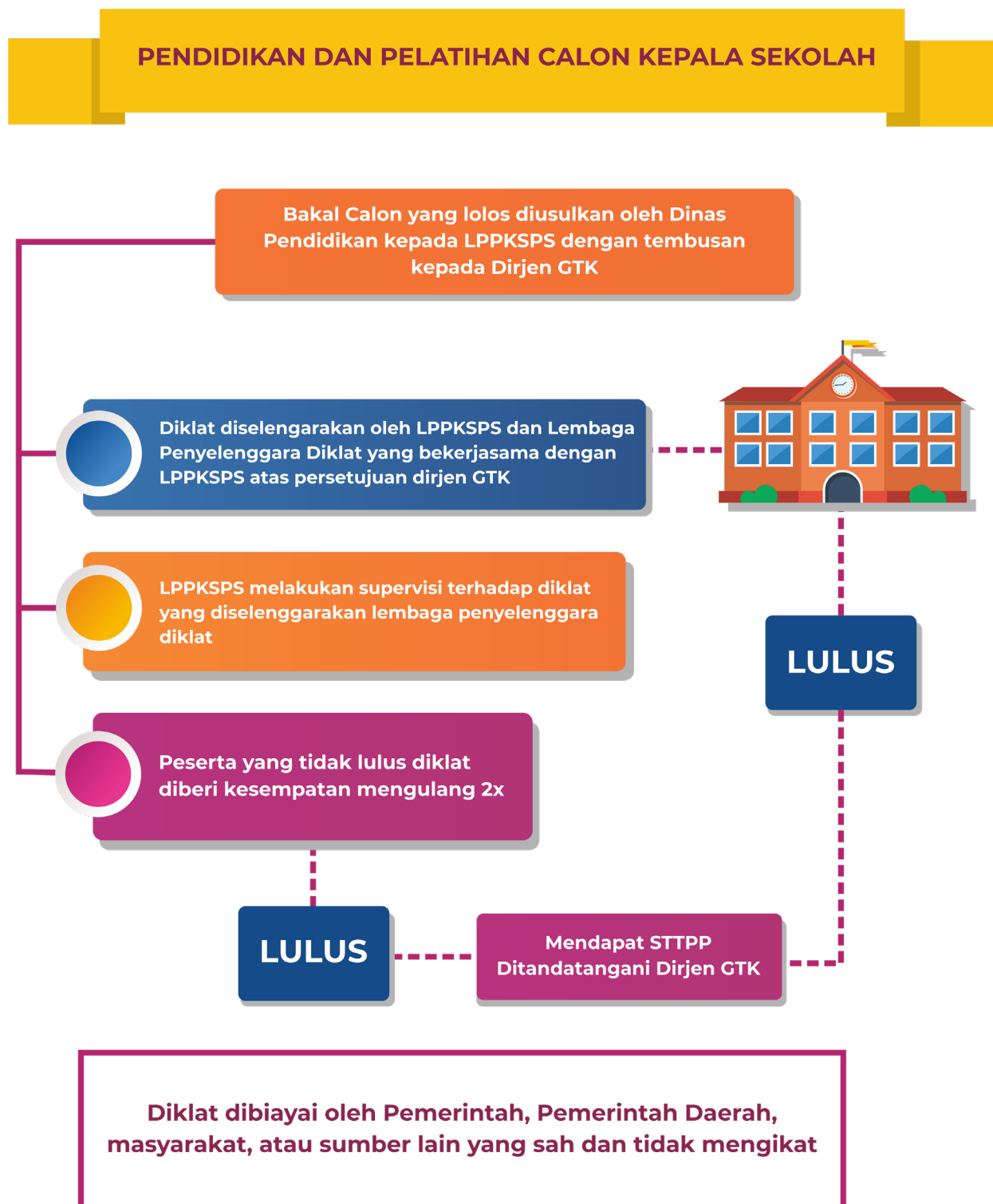
Infografis 17. Seleksi Calon Kepala Sekolah

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH



K. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Infografis 18. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah



L. Proses Pengangkatan Kepala Sekolah

Infografis 19. Proses Pengangkatan Kepala Sekolah



M. Penugasan Kepala Sekolah

Infografis 20. Penugasan Kepala Sekolah



N. Tugas Pokok Kepala Sekolah

Infografis 21. Tugas Pokok Kepala Sekolah

TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

PENGEMBANGAN JIWA KEWIRAUSAHAAN

1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan Sekolah.
2. Menerapkan kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan Sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
3. Memotivasi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Memotivasi Peserta Didik.
5. Mengembangkan pengelolaan kegiatan produksi Sekolah. sebagai sumber belajar Peserta Didik.



SUPERVISI

1. Merencanakan program supervisi.
2. Melaksanakan program supervisi.
3. Menindaklanjuti program supervisi.



MANAJERIAL

1. Menyusun perencanaan Sekolah/ Madrasah.
2. Mengembangkan organisasi Sekolah/ Madrasah
3. Memimpin Sekolah/ Madrasah.
4. Mengelola perubahan dan pengembangan - pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran Sekolah/ Madrasah.
5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran Peserta Didik.
6. Mengelola Guru dan Staff dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia.
7. Mengelola sarana dan prasarana Sekolah.
8. Mengelola hubungan Sekolah dan Masyarakat.
9. Mengelola peserta didik.
10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
11. Mengelola keuangan Sekolah.
12. Mengelola ketatausahaan Sekolah.
13. Mengelola Unit Layanan Khusus Sekolah.
14. Mengelola Sistem Informasi Sekolah.
15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Sekolah.
16. Mewujudkan peningkatan kinerja Sekolah.
17. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.



Lampiran Dasar Hukum

- A** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- B** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
- C** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- D** Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19732/B.B13/HK/2018 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.
- E** Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 2.
- F** Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0801/B.B1.3/HK/2019 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 3
- G** Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5497/b.b1.3/HK/2019 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan pemberdayaan Kepala sekolah tahap 4
- H** Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19998/B.1.3/GT/2018 Tentang Tata Kelola Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
- I** Surat Edaran Direktur Jenderal guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18356 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- J** Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH (LPPKSPS)

Kp. Dadapan RT.006/RW.007, Ds.Jatikuwung, Kec. Gondangrejo,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Telp. +62 271 8502888 Fax. +62 271 8502000 Email : lppks@kemdikbud.go.id

Hubungi kami di



lppks.kemdikbud.go.id



[lppksps.kemdikbud](https://www.instagram.com/lppksps.kemdikbud)



[LPPKS TV](#)



[LPPKSPS.Kemdikbud](https://www.facebook.com/LPPKSPS.Kemdikbud)



[LPPKSPS](https://twitter.com/LPPKSPS)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH**

Kp. Dadapan RT 06 RW 07 Ds. Jatikuwung Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar - JAWA TENGAH
Telp. (0271) 8502888 Fax. (0271) 8502000 email: lppks@kemdikbud.go.id